

**PERAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
(BOSDA) DALAM PERLUASAN AKSES PENDIDIKAN
DI SMK NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG**

Skripsi

Oleh

NEILLISA REGGA SYAHPUTRI



**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PERAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) DALAM PERLUASAN AKSES PENDIDIKAN DI SMK NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG

Oleh
Neillisa Regga Syahputri

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang peran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dalam perluasan akses pendidikan di SMK Negeri 1 Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian Kepala Sekolah, Bendahara BOSDA Sekolah, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik Kelas XI Penerima BOSDA. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi sedangkan analisis data menggunakan uji kredibilitas dengan kritik sumber dan triangulasi.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa peran program BOSDA dalam perluasan akses pendidikan di SMK Negeri 1 Bandar Lampung telah dilaksanakan dengan baik, seperti memberikan upaya mengenyam pendidikan bagi peserta didik tidak mampu di SMK Negeri 1 Bandar Lampung dengan membebaskan biaya SPP, pembelian dan penggandaan paket buku pelajaran, kegiatan ekstraikurikuler dan program bimbel/les bagi peserta didik tidak mampu, serta membantu operasional pembelajaran dengan melengkapi alat dan bahan praktik. Ditunjukkan dengan ketercapaian program BOSDA Sekolah sesuai sasaran, tujuan dan keefektifan serta efisien berjalannya program dengan mengedepankan persamaan dan keadilan tanpa diskriminasi dalam mengakses pendidikan terhadap peserta didik tidak mampu di lingkungan SMK Negeri 1 Bandar Lampung.

Kata Kunci: *Peran, Program BOSDA, Perluasan Akses Pendidikan*

ABSTRACT

ROLE OF REGIONAL SCHOOL OPERATIONAL ASSISTANCE PROGRAM (BOSDA) IN EXPANDING ACCESS TO EDUCATION AT SMK NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG

By
Neillisa Regga Syahputri

The purpose of this research is to describe the role of regional School Operations Assistance (BOSDA) in the expansion of access to education in SMK Negeri 1 Bandar Lampung. The research method used in this research is a qualitative descriptive with the subject of the principal's research, the treasurer of BOSDA School, the educators and learners of classes XI BOSDA receivers. Data collection techniques using interviews, observations, and documentation while analyzing data using credibility tests with source criticism and triangulation.

The results of this research showed that the role of BOSDA program in the expansion of access to education in SMK Negeri 1 Bandar Lampung has been implemented properly, such as giving educational efforts for poor students to be able getting appropriate facilities at SMK Negeri 1 Bandar Lampung by freeing up the cost of SPP, purchasing and copying textbooks, activities and programmes for learners who can not afford, and to assist with the operation of learning by equipping the tools and materials of practice. The data showed that the achievement of the school BOSDA program in accordance with the objectives is demonstrated, moreover, to build up the objectives effectiveness and efficiency of the program is by advancing equality and fairness without discrimination in accessing education of learners who are not able to Environment of SMK Negeri 1 Bandar Lampung.

Keywords: *roles, BOSDA Program, expanded education access*

**PERAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
(BOSDA) DALAM PERLUASAN AKSES PENDIDIKAN
DI SMK NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG**

Oleh
NEILLISA REGGA SYAHPUTRI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN
Pada
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **PERAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) DALAM PERLUASAN AKSES PENDIDIKAN DI SMK NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Neiffisa Regga Syahputri**

No. Pokok Mahasiswa : **1513032050**

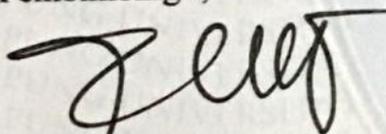
Program Studi : **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Jurusan : **Pendidikan IPS**

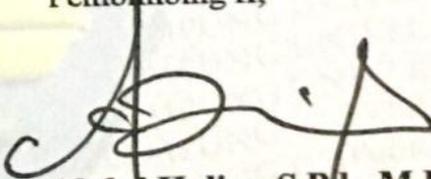
Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

MENYETUJUI
1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I,

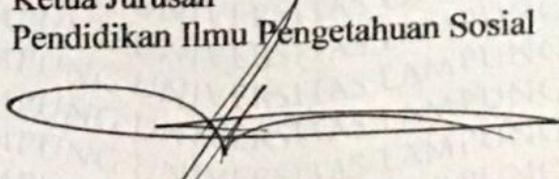

Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.
NIP 19820727 200604 1 002

Pembimbing II,

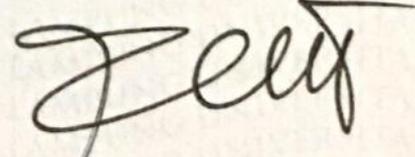

Abdul Halim, S.Pd., M.Pd.
NIDN 0005058310

2. Mengetahui

Ketua Jurusan
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial


Drs. Tedi Rusman, M.Si.
NIP 19600826 198603 1 001

Ketua Program Studi PPKn


Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.
NIP 19820727 200604 1 002

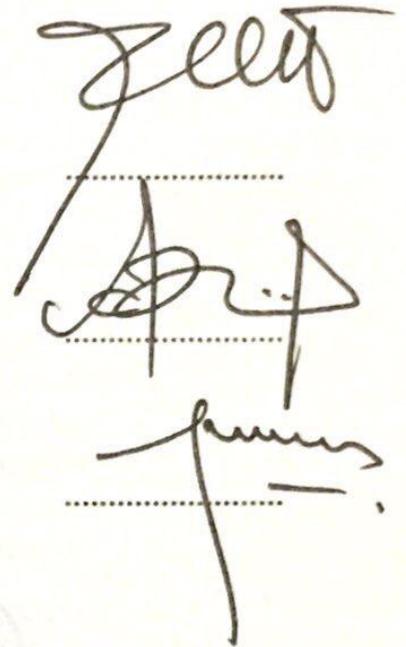
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.**

Sekretaris : **Abdul Halim, S.Pd., M.Pd.**

Penguji
Bukan Pembimbing : **Drs. Berchah Pitoewas, M.H.**



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd.
NIP 19620804 198905 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **28 Mei 2019**

SURAT PERNYATAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Neillisa Regga Syahputri
NPM : 1513032050
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Jurusan/Program Studi : Pendidikan IPS/ PPKn

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 28 Mei 2019



Neillisa Regga Syahputri
1513032050

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Metro pada tanggal 28 Maret 1997.

Penulis adalah anak kedua dari tiga bersaudara buah cinta kasih dari pasangan Bapak AKP Syahdan dan Ibu Dra.

Lisneli, M.Pd. Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis:

1. TK Harapan Ibu Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2003
2. SD Negeri 1 Sukarame yang diselesaikan pada tahun 2009
3. SMP Negeri 23 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2012
4. SMA Negeri 12 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2015

Pada tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung melalui jalur seleksi Mandiri. Pada bangku kuliah, penulis pernah menjadi bagian dari Forum Pendidikan Kewarganegaraan (FORDIKA). Penulis pernah mengikuti Kuliah Kerja Lapangan (KKL) pada tanggal 22-28 Januari 2017. Penulis juga telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon Tanjung Siom Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus dan Program Pengalaman Lapangan (PPL) di SMK PGRI 1 Limau selama kurang lebih 45 hari terhitung tanggal 11 Juli sampai dengan 25 Agustus.

MOTTO

Great things are not done by impulse, but by a series of small things brought together.
(Vincent Van Gogh)

Semesta memiliki banyak kejutan, tugasmu adalah berusaha untuk meraihnya.
(Neillisa Regga Syahputri)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbilalamiin, dengan mengucapkan puji syukur kepadamu Allah SWT atas kemudahan, kelimpahan rahmat dan karunia-Nya. Kupersembahkan karya ini sebagai tanda baktiku dan kecintaanku kepada:

“Kedua orangtuaku yang sangat aku cintai, yang paling berarti di hidupku, AKP Syahdan dan Dra. Lisneli, M.Pd. Kakak ku Alm. Letisia Ega Saputri, dan Adik ku Firnanda Raga Syahputra. Terimakasih atas segala kasih sayang, kesabaran, dukungan dan pengorbanan yang telah kalian diberikan serta do’a disetiap sujudnya demi keberhasilanku.”

Almamater tercinta, Universitas Lampung

SANWACANA

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Dalam Perluasan Akses Pendidikan Di SMK Negeri 1 Bandar Lampung”**. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Lampung. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang dalam dan setulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Sunyono, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
4. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bagian Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;

5. Ibu Dr. Riswanti Rini, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
6. Bapak Drs. Tedi Rusman, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
7. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Lampung sekaligus pembimbing akademik dan selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta memberikan motivasi, ilmu, dukungan, arahan dan nasehat selama proses penyelesaian skripsi;
8. Bapak Abdul Halim, S.Pd., M.Pd selaku dosen pembimbing II. Terimakasih atas bimbingan, motivasi, dukungan, ilmu, waktu, tenaga, arahan, serta nasehatnya selama proses penyelesaian skripsi;
9. Bapak Drs. Berchah Pitoewas, M.H selaku dosen pembahas I. Terimakasih atas setiap saran, arahan, kritik dan masukan yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini;
10. Bapak Obby Taufik Hidayat, S.Pd., M.Pd selaku dosen pembahas II. Terimakasih atas masukan, saran, dan nasehat yang telah diberikan;
11. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya yang sangat berharga selama masa perkuliahan;

12. Bapak Drs. Moh. Edy Harjito selaku kepala SMK Negeri 1 Bandar Lampung yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis;
13. Ibu Erfinetty Rizma, S.H., M.H selaku Bendahara BOSDA SMK Negeri 1 Bandar Lampung yang telah meluangkan waktu, membimbing, dan memberikan saran selama penelitian;
14. Ibu Dwi Mailinda, S.Si dan guru-guru SMK Negeri 1 Bandar Lampung yang telah menghibur canda tawa, terimakasih atas bimbingannya selama penelitian;
15. Peserta Didik SMK Negeri 1 Bandar Lampung, Khususnya Penerima Program BOSDA terimakasih atas canda tawa dan ketersediaannya melakukan wawancara penelitian skripsi ini.
16. Teristimewa untuk keluargaku tercinta, Ayahanda AKP Syahdan dan Ibunda Dra. Lisneli, M.Pd., kakak ku Alm. Letisia Ega Saputri dan adik ku Firnanda Raga Syahputra serta keluarga besar, terimakasih atas kasih sayang, kesabaran, dukungan, kebahagiaan dan motivasi serta do'a yang selalu diberikan. Semoga Allah selalu menjaga kalian dalam lindungan, rahmat dan keimanan.
17. Teruntuk M. Fery Imawan, terimakasih atas dukungan, semangat dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis.
18. Sahabatku Sistuurs Melvi Nancilia Putri, Gita Rahmi Pertiwi, Pranita Dewi Vanli, dan Ratu Maura Maghfira. Terimakasih telah menjadi penyemangat, pendukung , selalu ada saat penulis membutuhkan, menemani, menjadi pendengar yang baik serta menjadi sahabat yang sangat mengerti keadaan.

19. Sahabat Bnl Gita Rahmi Pertiwi, Meriana Kusumastuti, Nur Shelina, Cahaya Erizha Saputri, Ajeng Sekar Kinanti, Rezki Ervinda Dinar, terimakasih atas semangat, canda tawa, kritik dan saran yang telah diberikan membuat penulis semakin termotivasi untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
20. Sahabat Zamur Squad Mew, Gita, Seli, Cahaya, Ajeng, Ervinda, Dina, Laila, Putri, Sonia, Anu, Fakhri, Rici, Paping, Ucup dan Yori. Terimakasih telah mewarnai masa perkuliahan dengan canda tawa.
21. Saudara sekaligus adik-adikku, Dira dan Nabillah yang sudah menjadi pendukung, penyemangat serta pengganggu pembuatan skripsi ini.
22. Teman-teman KKN Pekon Tanjung Siom Kec. Limau Kab. Tanggamus dan PPL SMK PGRI 1 Limau alias teman Misqueen Signal Agil, Arini, Annisa, Epi, Nia, Puah, Putri, Dwiky dan Kak Fery. Terimakasih sudah memberikan canda tawa dan banyak pengalaman berharga untuk penulis.
23. Si Gemor Vivi, Ojan, Uco dan Rio. Terimakasih telah mewarnai masa SMA dengan semangat dan dukungan hingga saat ini.
24. Sahabat SD ku, Elza, Ratih, Vania dan Putri. Terimakasih atas semangat dan kenangan indah yang diberikan.
25. Seluruh teman – teman PPKn 2015, kakak-kakak angkatan 2013 dan 2014 serta adik-adik angkatan 16, 17 dan 18 yang telah menemani semasa perkuliahan, berpartisipasi dan membantu. Kenangan ketika kuliah yang akan selalu penulis rindukan.
26. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan mempermudah penulis dalam penyelesaian skripsi.

Akhir kata, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini ditulis dengan usaha semaksimal mungkin dengan kemampuan penulis. Jika masih terdapat banyak kekurangan, dapat dijadikan evaluasi atau penelitian lanjutan. Namun besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 28 Mei 2019

Penulis

Neillisa Regga Syahputri
1513032050

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	13
C. Rumusan Masalah.....	14
D. Tujuan Penelitian	14
E. Kegunaan Penelitian	14
1. Kegunaan Teoritis	14
2. Kegunaan Praktis	15
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	16
1. Ruang Lingkup Ilmu	16
2. Ruang Lingkup Subjek Penelitian.....	16
3. Ruang Lingkup Objek Penelitian.....	16
4. Ruang Lingkup Tempat Penelitian	16
5. Waktu Penelitian	16

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Peran	17
B. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik	19
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	19
2. Ciri-Ciri Kebijakan Publik.....	21
3. Jenis-Jenis Kebijakan Publik	23

4. Tahap-Tahap Kebijakan Publik	24
5. Kebijakan Pendidikan	27
C. Tinjauan Tentang Pendidikan	29
1. Pengertian Pendidikan	29
2. Teori Pendidikan	31
3. Faktor-Faktor Pendidikan	33
4. Tujuan Pendidikan	34
D. Tinjauan Tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)	36
1. Pengertian Program BOSDA	37
2. Tujuan Program BOSDA	38
3. Sasaran Program BOSDA	38
4. Kriteria Penerima Program BOSDA	39
5. Persyaratan Penerima Program BOSDA	40
6. Prinsip Pemberian Program BOSDA	41
7. Mekanisme Penetapan Alokasi Program BOSDA	42
D. Tinjauan Tentang Perluasan Akses Pendidikan	43
F. Kajian Penelitian Yang Relevan	47
1. Nasional	47
2. Lokal	48
G. Kerangka Berpikir	49

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	53
B. Subjek Penelitian atau Informan	54
C. Instrumen Penelitian	55
D. Lokasi dan Waktu Penelitian	56
1. Lokasi Penelitian	56
2. Waktu Penelitian	56
E. Data dan Sumber Data	57
F. Teknik Pengumpulan Data	57
1. Observasi	58
2. Wawancara	59
3. Dokumentasi	60
G. Uji Kredibilitas	63
H. Teknik Analisis Data	63
1. Reduksi Data	63
2. Penyajian Data	64
3. Verifikasi	64
I. Tahapan Penelitian	65
1. Persiapan Pengajuan Judul	65
2. Penelitian Pendahuluan	66
3. Pengajuan Rencana Penelitian	67
4. Penyusunan Kisi dan Instrumen Penelitian	67
5. Pelaksanaan Penelitian	68

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum	70
1. Gambaran Umum Lokasi Sekolah	70

2. Gambaran Umum Informan	88
B. Uji Kredibilitas.....	89
C. Deskripsi Hasil Penelitian	89
1. Paparan Data	90
2. Temuan Penelitian.....	120
D. Pembahasan.....	125
1. Peran Program BOSDA	126
2. Perluasan Akses Pendidikan.....	131
E. Keunikan Hasil Penelitian.....	136

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	139
B. Saran.....	141

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.....

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Data Satuan Biaya Alokasi Program BOSDA Provinsi Lampung	9
1.2 Data Peserta Didik Penerima BOSDA Di SMK Negeri 1 Bandar Lampung	12
3.1 Jadwal Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi Penelitian di SMK Negeri 1 Bandar Lampung	69
4.1 Data Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK Negeri 1 Bandar Lampung	84
4.2 Daftar Jumlah Peserta Didik di SMK Negeri 1 Bandar Lampung.....	85
4.3 Data Peserta didik Penerima BOSDA di SMK Negeri 1 Bandar Lampung.....	86
4.4 Gambaran Umum Informan Penelitian.....	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Tahap-Tahap Kebijakan	26
2.2 Kerangka Pikir	52
3.1 Triangulasi Pengumpulan Data	62
3.2 Analisis Data Menurut Miles Dan Huberman.....	65
4.1 SMK Negeri 1 Bandar Lampung	73
4.2 Visi, Misi dan Tujuan SMK Negeri 1 Bandar Lampung	75
4.3 Kebijakan Mutu SMK Negeri 1 Bandar Lampung	76
4.4 Daftar Kompetensi Keahlian Di SMK Negeri 1 Bandar Lampung	82
4.5 Struktur Organisasi SMK Negeri 1 Bandar Lampung	83
4.6 Proses wawancara dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bandar Lampung.....	94
4.7 Proses wawancara dengan Bendahara BOSDA SMK Negeri 1 Bandar Lampung	96
4.8 Laporan Proposal RKAS.....	98
4.9 Berkas Permohonan Keringanan.....	100
4.10 Proses wawancara dengan Peserta Didik 1 dan 2	110
4.12 Proses wawancara dengan Informan Tenaga Pendidik.....	116
4.13 Scoring Verifikasi BOSDA.....	117

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Pengajuan Judul Skripsi dan Calon Pembimbing.....	146
2. Surat Penetapan Komisi Pembimbing Skripsi	147
3. Surat Kesiediaan Membimbing I Skripsi	148
4. Surat Kesiediaan Membimbing II Skripsi.....	149
5. Surat Pengesahan Susunan Komisi Pembimbing.....	150
6. Keterangan Rencana Judul.....	151
7. Surat Izin Penelitian Pendahuluan	152
8. Surat Balasan Penelitian Pendahuluan	153
9. Lembar Persetujuan Seminar Proposal	154
10. Surat Keterangan Telah Melakukan Seminar Proposal	155
11. Kartu Perbaikan Seminar Proposal Pembimbing I	156
12. Kartu Perbaikan Seminar Proposal Pembimbing II	157
13. Kartu Perbaikan Seminar Proposal Pembahas I.....	158
14. Kartu Perbaikan Seminar Proposal Pembahas II	159
15. Rekomendasi Kartu Perbaikan Seminar Proposal Pembimbing I.....	160
16. Rekomendasi Kartu Perbaikan Seminar Proposal Pembimbing II	161
17. Rekomendasi Kartu Perbaikan Seminar Proposal Pembahas I.....	162
18. Rekomendasi Kartu Perbaikan Seminar Proposal Pembahas II.....	163

19. Rekomendasi Kartu Perbaikan Seminar Proposal Pembimbing dan Pembahas	164
20. Surat Izin Penelitian	165
21. Surat Balasan Penelitian.....	166
22. Lembar Persetujuan Seminar Hasil.....	167
23. Surat Keterangan Telah Melakukan Seminar Hasil.....	168
24. Kartu Perbaikan Seminar Hasil Pembimbing I.....	169
25. Kartu Perbaikan Seminar Hasil Pembimbing II.....	170
26. Kartu Perbaikan Seminar Hasil Pembahas I.....	171
27. Rekomendasi Kartu Perbaikan Seminar Hasil Pembimbing I.....	172
28. Rekomendasi Kartu Perbaikan Seminar Hasil Pembimbing II.....	173
29. Rekomendasi Kartu Perbaikan Seminar Hasil Pembahas I.....	174
30. Kisi-Kisi Pedoman Wawancara	175
31. Instrumen Pedoman Wawancara.....	183
32. Kisi-Kisi Pedoman Observasi	190
33. Instrumen Pedoman Observasi.....	191
34. Kisi-Kisi Pedoman Dokumentasi.....	192
35. Jurnal Penelitian.....	193
36. Jadwal Penelitian.....	211
37. Uji Kredibilitas.....	212
1. Kritik Sumber.....	212
2. Triangulasi.....	213
38. Dokumentasi Penelitian	215

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terbatasnya akses pada pendidikan di Indonesia berdampak terhadap masyarakat daerah kabupaten yang berujung meningkatnya urbanisasi untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik di perkotaan. Sehingga secara tidak langsung mendorong masyarakat Indonesia untuk melakukan urbanisasi karena keterbatasan fasilitas di daerah. “keterbatasan akses pendidikan menjadi suatu masalah yang masih belum dapat dijamah dengan baik. Ketika kebutuhan untuk mengakses pendidikan itu sangat besar, ternyata pada kenyataannya tidak berbanding lurus untuk mencapai akses tersebut pada akhirnya memunculkan masalah baru. Salah satu contoh misalnya adalah keterbatasan akses pendidikan di daerah yang akhirnya menjadi pangkal dasarnya arus urbanisasi” Baswedan dikutip dalam artikel Groedu Acedemy (2015). Oleh karena itu, akses pendidikan harus dibuka seluas-luasnya untuk seluruh masyarakat dengan penyediaan fasilitas yang mendukung program-program tersebut.

Selain itu, hal ini juga dapat disebabkan karena rendahnya tingkat ekonomi masyarakat di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa “pada bulan maret 2018, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan

pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 9,82 persen atau 25,95 juta orang” angka ini merupakan yang pertama kalinya dalam sejarah Indonesia kemiskinan berada pada level *single digit* yang sebelumnya selalu berada pada *double digit*. Namun, dengan posisi ini seharusnya dapat dijadikan acuan bagi pemerintah Indonesia agar lebih baik lagi dalam mengurus sektor ekonomi yang berimbas pada kemiskinan, terutama dibidang pendidikan. “Pusat Data Statistik Depdiknas mencatat ada 4,9 juta anak yang belum berkesempatan memperoleh pendidikan dasar dan menengah” Lubis (2013: 2) Anak-anak tersebut terlepas dari dunia pendidikan karena kemiskinan, tinggal di daerah yang secara geografis sulit bahkan terpaksa untuk bekerja. Dengan demikian, perluasan akses terhadap pendidikan menengah bagi kelompok masyarakat miskin tidak hanya penting untuk mewujudkan akses yang lebih merata, tetapi juga berdampak pada perluasan akses secara agregat.

Indonesia telah mengatur hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan sebagai sarana dalam meningkatkan kualitas hidup, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “Hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan tanpa kecuali. Setiap warga negara berhak atas pendidikan dan pengembangan ilmu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.” Pendidikan dijadikan suatu faktor kebutuhan dasar untuk setiap manusia, karena melalui pendidikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan.

Pentingnya pendidikan sebagaimana diungkapkan oleh Joesoef (Nurfalah, 2019: 88) yaitu “pendidikan merupakan segala bidang kehidupan, dalam memilih dan membina hidup yang baik, yang sesuai dengan martabat manusia.” Dari pernyataan tersebut menyatakan bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa lepas dari kehidupan manusia.

Dapat diketahui bahwa maju atau tidaknya suatu negara dipengaruhi oleh faktor pendidikan, pentingnya peran pendidikan sehingga dapat dijadikan tolak ukur bangsa itu maju atau mundur. “Negara yang gagal mencetak kualitas SDM-nya akan mempunyai posisi tawar yang sangatlah rendah dan lama kelamaan akan menjadi negara terbelakang dan tertinggal. Oleh karena itu, pengelolaan pendidikan merupakan program yang harus menjadi primadona dari seluruh program pembangunan pemerintah, untuk menjadikan manusia-manusia Indonesia yang bermutu yang pada gilirannya akan mengakselerasi pertumbuhan negara” Roza (2007: 307). Melihat pentingnya pendidikan, sudah seharusnya pendidikan terus diperluas aksesnya agar dapat terus mencetak generasi penerus yang cerdas bagi bangsa, perluasannya pun harus merata sehingga anak-anak yang digolongkan keluarga tidak mampu juga bisa memperoleh pendidikan. Hal ini diperkuat dengan pendapat yang dikemukakan oleh Idris (2010: 93) “semua pihak seharusnya memiliki empati pada pendidikan yang merata bagi semua rakyat dan karena itu harus murah dan dapat diakses orang miskin”.

Rendahnya pendidikan membuat negara Indonesia mengalami krisis sumber daya manusia yang potensial, salah satu penyebabnya adalah masih belum

meratanya pendidikan di negara Indonesia sehingga belum menjangkau masyarakat kalangan bawah dikarenakan biaya pendidikan yang dianggap masih cukup berat dan sebagian warga masih belum berkesempatan untuk menikmati pendidikan sebagai hak dasar mereka. “betapa pentingnya pendidikan, tetapi tidak semua manusia dapat mengenyam pendidikan. Hal ini dikarenakan salah satu penyebabnya adalah ekonomi. Masyarakat yang ekonominya tidak mampu sulit untuk mendapatkan pendidikan. Apalagi tingkat pendidikan tinggi, karena untuk mencapai tingkat pendidikan tersebut diperlukan biaya yang tidak sedikit” Basnowi dan Juariyah (2010: 65)

Dalam pendidikan nasional, biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). “Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa berupa alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orangtua, maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tak langsung berupa keuntungan yang hilang (*earning forgone*) dalam bentuk biaya kesempatan belajar yang hilang (*opportunity cost*) yang dikorbankan siswa selama belajar” Fattah (Idris, 2010: 99). Biaya-biaya pendidikan tersebut merupakan hal yang harus ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat sebagai warga sekolah. Tetapi, yang menjadi masalah adalah pada kenyataannya biaya-biaya tersebut ditanggung oleh siswa, yang akhirnya membuat biaya pendidikan menjadi mahal.

Tingkat pendidikan pada saat ini terus mengalami peningkatan cukup tinggi setiap tahunnya, bahkan dilansir dari Kompas.com bahwa beberapa survey

seperti Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata kenaikan biaya pendidikan mencapai 10 persen pertahun. Senada dengan BPS, lembaga ZAP Finance juga menyatakan biaya pendidikan di Indonesia kisaran peningkatannya bisa mencapai 20 persen pertahun. Ini terjadi disebabkan beberapa hal seperti komersialisasi pendidikan dan perubahan status pendidikan. Komersialisasi pendidikan ini membuat biaya pendidikan semakin mahal dan banyaknya pungutan-pungutan biaya terhadap suatu lembaga pendidikan sehingga dampaknya terasa terhadap keluarga kurang mampu. Lalu, perubahan status pendidikan yang mana pemerintah mengeluarkan RUU tentang Badan Hukum Peradilan yang kemudian berdampak menjadi semakin tingginya biaya pendidikan terutama untuk duduk di sekolah-sekolah favorit. Hal-hal ini tentunya dapat menimbulkan diskriminasi terhadap hak memperoleh fasilitas pendidikan khususnya bagi anak dari keluarga kurang mampu. Padahal seyogianya, memperoleh fasilitas pendidikan dengan biaya murah yang layak dan bermutu merupakan hak warga negara sebagai hak asasi manusia dan menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya.

Majunya suatu negara bermula dari pendidikan yang layak dan berkualitas. Pendidikan berkualitas tentunya dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas pula. Berbagai masalah pendidikan yang ada, pemerintah memegang peranan penting dalam memudahkan akses pendidikan, seperti yang kita ketahui bahwa akses pendidikan di Indonesia masih dikatakan sulit mengingat tingginya biaya pendidikan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (4) yang berbunyi “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20

persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional” guna mendukung perluasan akses pendidikan.

Perluasan akses pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Lampung masih belum berjalan dengan baik. Pada permasalahan ini, pemerintah Daerah Lampung memiliki tanggung jawab untuk memberikan solusi dan mengatasinya. Perluasan akses pendidikan pada dasarnya dituntut untuk memperluas kesempatan serta menghapuskan diskriminasi terhadap anak dari keluarga miskin agar ikut merasakan mendapat pendidikan yang layak dan bermutu. Sesuai dengan Soesanto (Basrowi dan Juariyah, 2010: 65) yang mengemukakan bahwa “melalui pendidikan bagi individu yang berasal dari masyarakat miskin terbukalah kesempatan baru untuk menemukan suatu lapangan baru yang memberikan hasil yang lebih tinggi.” Oleh karena itu, jika seseorang memiliki tingkat pendidikan rendah, maka akan mempengaruhi kondisi sosial suatu masyarakat. Sebaliknya, yang dikhawatirkan Bung Karno akan terjadi bahwa “kita akan menjadi bangsa kuli dan kuli di antara bangsa-bangsa”. Dengan kondisi sosial tersebut maka akan banyak jumlah pengangguran, kriminalitas dan kemiskinan yang akan berdampak pada kemajuan bangsa.

Perluasan akses pendidikan ini hendaknya diawasi dan di kontrol dengan baik agar tidak terjadinya kecurangan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab demi kepentingan pribadi. Sebagai upaya untuk menciptakan manusia

bermutu dan mencerdaskan bangsa, pemerintah memiliki peran sangat penting dalam bidang pendidikan, yang mana pemerintah harus membuat suatu kebijakan dalam ranah pendidikan yang dapat mewujudkan salah satu cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kebijakan dapat diartikan sebagai “serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.” Friedrick (Suwitri, 2014: 6). Kebijakan Publik adalah “tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.” Young dan Quinn (Suharto, 2008: 44). Jadi pemerintah telah memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk membuat suatu kebijakan termasuk kebijakan dalam ranah pendidikan sebagaimana yang diungkapkan Nugroho (Barnoto, 2016: 230) bahwa “kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik dalam ranah pendidikan yang berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan yang mencakup tujuan pendidikan dan sebagaimana tujuan tersebut”. Pendidikan tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah lebih fokus kepada kebijakan pendidikan dalam rangka memperluas akses pendidikan, dibutuhkan perkembangan dan pembaharuan agar pendidikan semakin menarik dan inovatif.

Tertulis dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat (1) yang berbunyi “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu” yang berarti setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang sesuai. Oleh karena itu, pemerintah sebagai penyelenggara negara wajib untuk berupaya memenuhinya. Sebagai wujud konsistensi dalam penyelenggara pemerintah daerah, pemerintah daerah Indonesia khususnya pemerintah Provinsi Lampung membuat tindakan dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017. Peraturan ini berkaitan dengan pemberian bantuan dana bagi siswa yang tidak mampu guna menyetarakan pendidikan bagi peserta didik khususnya pada satuan pendidikan Menengah Atas dan Menengah Kejuruan. Program ini adalah Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), beberapa provinsi yang mendapatkan dana BOSDA misalnya di Provinsi Riau, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Lampung khususnya Kota Bandar Lampung.

Sebelum adanya program BOSDA terdapat kebijakan di bidang pendidikan dari pemerintah kota, yaitu Program Bina Lingkungan yang mana program bina lingkungan memberikan bantuan berupa pendidikan gratis kepada siswa/i sedangkan program BOSDA memberikan bantuan lebih kepada pemberian dana langsung ke Satuan Pendidikan Menengah sebagai bentuk pemenuhan pembiayaan pendidikan menengah.

Dalam upaya perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan mutu pendidikan serta menekan angka putus sekolah, pemerintah memperluas akses pendidikan yang lebih bermutu, luas dan merata dengan memberikan perhatian yang lebih besar kepada keluarga miskin perhatian tersebut berupa pemberian BOSDA. Tujuan program ini adalah untuk perluasan dan pemerataan pendidikan guna membantu mengentaskan kemiskinan melalui kemudahan dalam akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu agar mendapat kehidupan masa depan yang lebih baik. Di Provinsi Lampung, Kabupaten/Kota yang mendapatkan satuan biaya antara lain ialah Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.1 Data Satuan Biaya Alokasi BOSDA Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	Unit Cost @Siswa Pertahun	
		SMA	SMK
1.	Lampung Barat	Rp. 1.000.000	Rp. 1.140.000
2.	Lampung Utara	Rp. 1.000.000	Rp. 1.140.000
3.	Way Kanan	Rp. 1.000.000	Rp. 1.140.000
4.	Bandar Lampung	Rp. 1.560.000	Rp. 2.400.000

Sumber: Data Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2017.

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa biaya siswa pertahun untuk pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) lebih tinggi dibanding Sekolah Menengah Atas (SMA) hal ini terjadi karena seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan di SMK merupakan pendidikan yang telah dijuruskan jadi tentu biaya yang dikeluarkan akan lebih mahal karena adanya biaya kegiatan praktik sekolah serta pembelian alat dan bahannya.

Program BOSDA ini beriringan dengan program BOS Nasional (BOSNAS) yang sebelumnya telah dijalankan untuk membantu penyediaan dana bagi

peserta didik tidak mampu pada jenjang pendidikan. Program BOSNAS merupakan program pemerintah berupa pemberian dana langsung ke sekolah baik Negeri maupun Swasta sebagai pelaksana program wajib belajar. Bantuan yang diberikan program BOSNAS lebih mengacu kepada bantuan non personalia seperti pemenuhan kebutuhan paket buku bagi para peserta didik tidak mampu di sekolah. Program BOSDA dibentuk untuk menjadi pendamping bagi program BOSNAS serta diharapkan agar dapat menutupi kekurangan BOSNAS yang telah dijalankan oleh pemerintah pusat dengan tujuan yang sama yaitu untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu guna meningkatkan kualitas pendidikan dan memenuhi kebutuhan masyarakat agar tetap mampu memperoleh pendidikan yang lebih baik.

Berdasarkan survey awal yang telah peneliti amati, ternyata ada beberapa faktor dalam pelaksanaan pendidikan di Provinsi Lampung khususnya pada SMK Negeri 1 Bandar Lampung masalah paling signifikan adalah biaya, tidak sedikit anak-anak yang tidak melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi dikarenakan masyarakat menganggap bahwa biaya sekolah terlalu besar. Ini jelas menjadi sebuah permasalahan yang tidak bisa dianggap sebelah mata, tidak hanya biaya saja yang menjadi masalah utama tetapi ada faktor lain seperti kurangnya kesadaran orangtua akan pentingnya sekolah bagi anak-anak mereka. Oleh sebab itu dibuat Program Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan dan pemerataan pendidikan yang menyeluruh. Dengan adanya program BOSDA diharapkan

bisa meningkatkan motivasi peserta didik untuk melanjutkan sekolah walau mengenyam status keluarga yang kurang mampu sekalipun.

Pendidikan dianggap sebagai unsur utama dalam pengembangan sumber daya manusia dan lebih bernilai jika memiliki sikap, perilaku, wawasan, kemampuan, keahlian serta keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan di bidang sektor. Keahlian dan keterampilan ini bisa didapatkan pada pendidikan formal, seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). SMK dapat dijadikan sebagai sarana bagi peserta didik yang menggali potensi dirinya, sesuai minat dan bakat yang dimiliki peserta didik itu sendiri.

SMK Negeri 1 Bandar Lampung merupakan Sekolah Menengah Kejuruan yang telah berdiri pada tahun 1959, sebelumnya nama SMK Negeri 1 Bandar Lampung ialah SMEA Negeri 1 Tanjung Karang, lalu pada tahun 1990 SMEA Negeri 1 Tanjung Karang dipecah menjadi SMEA 1 Tanjung Karang (SMK Negeri 1 Bandar Lampung) dan SMEA 2 Tanjung Karang (SMK Negeri 4 Bandar Lampung). Sekolah Menengah Kejuruan yang sudah menerapkan sistem SNI ISO 9001:2008 ini memiliki beberapa bidang jurusan diantaranya ialah Teknik Komputer Jaringan (TKJ), Multimedia, Administrasi Perkantoran, Akuntansi, Pemasaran, Animasi, Tata Boga, dan Tata Busana. SMK Negeri 1 Bandar Lampung ialah salah satu sekolah negeri yang mendapatkan dana dari program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dengan penerimaan peserta didik sebesar 60 persen bagi penerima program BOSDA.

Berikut data jumlah peserta didik penerima program BOSDA dapat dilihat pada tabel:

Tabel 1.2 Data Peserta didik Penerima program BOSDA di SMK Negeri 1 Bandar Lampung.

No	Jurusan	Kelas	
		Kelas XI	Kelas XII
1	Akuntansi 1	17	19
2	Akuntansi 2	17	15
3	Akuntansi 3	-	26
4	Adm. Perkantoran 1	22	20
5	Adm. Perkantoran 2	-	22
6	Adm. Perkantoran 3	-	19
7	Pemasaran 1	20	19
8	Pemasaran 2	-	12
9	TKJ 1	12	16
10	TKJ 2	18	22
11	TKJ 3	-	27
12	Multimedia 1	15	19
13	Multimedia 2	-	23
14	Animasi	14	9
15	Tata Boga 1	23	30
16	Tata Boga 2	-	25
17	Tata Busana	21	28
		179	351

Sumber: Data TU SMK Negeri 1 Bandar Lampung Tahun 2018/2019.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada peserta didik SMK penerima program BOSDA diketahui bahwa mereka mengakui jika tidak mendapatkan bantuan dari program BOSDA kemungkinan kesempatan mereka bersekolah sangat kecil mengingat pekerjaan orangtua yang dapat dikatakan tidak cukup untuk membayar uang sekolah, karena pada dasarnya sekolah formal tidak hanya membayar iuran sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) tetapi masih ada keperluan yang harus di bayar, seperti seragam sekolah, buku penunjang pelajaran, alat-alat tulis dan sebagainya. Oleh karena itu, kesempatan untuk bersekolah ini dimanfaatkan untuk kehidupan yang lebih baik dimasa depan. Hal ini yang harus dipertimbangkan dalam perluasan akses pendidikan bagi

keluarga tidak mampu agar mereka dapat mengetahui hal yang berkaitan dengan bantuan-bantuan dalam bidang pendidikan seperti program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) guna membantu meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah di jabarkan, peneliti memilih untuk melakukan penelitian guna mengetahui bagaimanakah peran program BOSDA dalam memperluas akses pendidikan di Indonesia khususnya provinsi lampung agar memberikan kesempatan bagi peserta didik tidak mampu memperoleh pendidikan. Dengan demikian, judul penelitian ini adalah “**Peran Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Dalam Perluasan Akses Pendidikan Di SMK Negeri 1 Bandar Lampung**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka penelitian ini dapat difokuskan terhadap peran program BOSDA dalam perluasan akses pendidikan di SMK Negeri 1 Bandar Lampung, maka sub-fokus pada penelitian ini meliputi:

1. Peran Program BOSDA Sekolah dilihat dari ketepatan sasaran program, tujuan Program, serta efektif dan efisien berjalannya program di Sekolah.
2. Upaya perluasan akses pendidikan yang dilakukan di sekolah dengan mengedepankan kesamaan memperoleh hak mengakses layanan pendidikan dan mendapatkan perlakuan adil dalam pelayanan pendidikan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya maka hal yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana peran program BOSDA dalam perluasan akses pendidikan khususnya di SMK Negeri 1 Bandar Lampung?”

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran program BOSDA dalam perluasan akses pendidikan.
2. Untuk mendeskripsikan peran program BOSDA dalam perluasan akses pendidikan.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Secara teoritis penelitian diharapkan dapat berguna untuk memberikan pengetahuan baik bagi pembaca maupun peneliti dalam konsep ilmu pendidikan, khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai Hukum dan Kemasyarakatan yang mengkaji upaya penyadaran dan pembinaan terhadap kesadaran hukum sebagai individu maupun anggota masyarakat sebagai upaya mewujudkan ketertiban umum yang terfokus pada peran program BOSDA yang dibuat oleh gubernur dalam perluasan akses pendidikannya.

- b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan kajian bagi penelitian selanjutnya yang serupa khususnya dalam konteks peran program BOSDA dalam memperluas akses pendidikan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Dinas Pendidikan

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan analisis agar program BOSDA dapat terus diperbarui dan ditingkatkan fasilitasnya, sehingga dapat terus mengupayakan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan kepada peserta didik tidak mampu khususnya di Provinsi Lampung.

- b. Bagi Sekolah

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan kajian bagi sekolah dalam mengetahui bagaimana peran program BOSDA dalam memperluas akses pendidikan, sehingga dapat membimbing peserta didik untuk belajar lebih giat karena telah mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan formal yang layak.

- c. Bagi Peserta Didik

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi peserta didik khususnya penerima program BOSDA agar dapat termotivasi untuk meraih prestasi di sekolah.

F. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk ruang lingkup ilmu Pendidikan, khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan wilayah kajian PKN sebagai Hukum dan Kemasyarakatan. Dalam penelitian ini, pokok kajian membahas tentang peran program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dalam perluasan akses pendidikan di SMK Negeri 1 Bandar Lampung yang juga berkaitan dengan efisiensi kebijakan publik.

2. Ruang Lingkup Subjek Penelitian

Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bandar Lampung, Tenaga Pendidik/Guru dan bendahara BOSDA SMK Negeri 1 Bandar Lampung serta peserta didik kelas XI penerima program BOSDA tahun ajaran 2018/2019.

3. Ruang Lingkup Objek Penelitian

Ruang Lingkup objek penelitian ini adalah peran program BOSDA dalam upaya perluasan akses pendidikan di SMK Negeri 1 Bandar Lampung.

4. Ruang Lingkup Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 1 Bandar Lampung.

5. Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian sejak dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan nomor 7118/UN26.13/PN.01.00/2018 oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan selesainya penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Peran

Peran secara luas diartikan sebagai tindakan dari individu atau kelompok sesuai dengan status sosial. Seperti, ketika seseorang telah menjalankan hak dan kewajibannya maka dapat dikatakan seseorang tersebut telah menjalankan “peran” selayaknya warga negara. “Peran (*role*) adalah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu ” Cohen (Syarbaini dan Rusdiyanta, 2009: 60). Sejalan dengan pendapat tersebut “peran dapat didefinisikan sebagai keteraturan perilaku yang diharapkan individu” Supardi (2011: 88). Disisi lain, Margono (Tami, Holilullah dan Nurmalisa, 2016: 4) berpendapat bahwa “peranan adalah suatu perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam masyarakat.” Dengan demikian, peran didefinisikan sebagai suatu rangkaian tindakan atau perilaku individu maupun sekelompok orang dalam lingkup sosial dengan kedudukan tertentu, baik secara formal maupun informal.

Peranan setidaknya mencakup paling sedikit tiga hal yang berkaitan dengan social menurut Levison (Syarbaini dan Rusdiyanta, 2009: 60), yaitu:

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.

- 2) Peran adalah suatu konsep tentang ikhwal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran seseorang lebih banyak menunjukkan suatu proses dari fungsi dan kemampuan mengadaptasi diri dalam lingkungan sosialnya.

Peranan dapat dibagi dua, yaitu berdasarkan cara memperoleh dan berdasarkan pelaksanaannya. Menurut Levison (Syarbaini dan Rusdiyanta, 2009: 60)

Peranan berdasarkan cara memperolehnya, dapat dibedakan menjadi:

- 1) Peranan bawaan (*ascribed roles*) yaitu peranan yang diperoleh secara otomatis, bukan karena usaha. Misalnya peranans sebagai nenek, anak kepala desa, dan sebagainya.
- 2) Peranan pilihan (*achieves roles*) yaitu peranan yang diperoleh atas dasar keputusannya sendiri, misalnya memutuskan untuk memilih kuliah di program studi Soisologi UI.

Sedangkan berdasarkan pelaksanaannya, peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Peranan yang diharapkan (*expected role*) peranan merupakan cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Atau pelaksanaan suatu peranan tertentu kita yang diharapkan oleh masyarakat agar menggunakan cara-cara yang sesuai dengan harapan mereka. Ada kalanya orang yang diharapkan tidak berperilaku sesuai cara-cara yang

konsisten dengan harapan-harapan orang lain. Misalnya peranan hakim, peranan protokoler diplomatik dan lain-lain.

- 2) Peranan nyata (*actual role*) yaitu bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan atau merupakan keadaan sesungguhnya dari seseorang dalam menjalankan peranan tertentu. Pelaksanaan peranan ini lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.

Dapat disimpulkan, peran merupakan tindakan yang dilakukan individu atau kelompok dalam kehidupan sesuai dengan kedudukan status sosial yang dimiliki dalam tatanan masyarakat.

B. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Konsep kebijakan publik merupakan terjemahan dari bahasa Inggris '*Public Policy*', '*public*'= publik dan '*policy*'=kebijakan. Sebelumnya, kata public policy diterjemahkan kebijaksanaan negara, tetapi kemudian dinilai tidak pas dan diganti dengan 'kebijakan publik' yang dinilai lebih benar.

Suharto (Suryanti, Pitoewas dan Yanzi 2017: 4) mendefinisikan bahwa “kebijakan adalah sebuah instrument pemerintah bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan juga *governance* yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik”. Kebijakan pada dasarnya merupakan suatu tindakan atau upaya dalam kesejahteraan yang dilakukan untuk rakyat atau masyarakat. Suwitri (2008: 6)

mengartikan publik sebagai “umum, rakyat, masyarakat, publik, dan negara atau pemerintahan” jadi, secara singkat atau sederhana kebijakan publik itu dapat diartikan sebagai 'tindakan yang dilakukan oleh pemerintah' atau 'aktivitas-aktivitas yang dilakukan pemerintah' (*'the actions of government'*).

Dye (Subarsono, 2013: 2) mengemukakan “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*Public policy is whatever governments choose to do or not to do*).” Pada pendapat ini, konsep yang dimiliki sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik.

Anggara (2014: 33) mendefinisikan kebijakan publik adalah:

Kebijakan publik adalah keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik, kebijakan publik harus dibuat oleh otoritas politik, yaitu mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah.

Sejalan dari pendapat Suharno (Andiyana, Yanzi dan Nurmalisa, 2016: 4) yang mengemukakan bahwa “kebijakan publik adalah keputusan pemerintah guna memecahkan masalah publik”.

Kebijakan publik adalah “Serangkaian tindakan yang bertujuan dan dilakukan serta diikuti oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah tertentu (*A purposive course of action followed by*

an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern)”

Anderson (Islamy, 2014: 4). Anderson menegaskan bahwa kebijakan publik mempunyai lima tujuan implikasi, yaitu:

(1) setiap kebijakan pasti bertujuan atau mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai; (2) kebijakan itu terdiri dari serangkaian tindakan atau pola-pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah; (3) kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah dan bukanlah apa yang pemerintah berkeinginan melakukan sesuatu atau hendak melakukan sesuatu; (4) kebijakan itu bisa berbentuk positif ataupun negatif; dan (5) kebijakan publik setidaknya-tidaknya dalam bentuknya yang positif didasarkan pada hukum dan karenanya bersifat otoritatif.

Kebijakan publik adalah “pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat (*Public policy is the authoritative allocation of values for the whole society*)” Easton (Anggara, 2014: 35).

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, industry, pertahanan, dan sebagainya. Suatu kebijakan dibuat dari pemerintah kepada rakyat untuk mencapai tujuan bersama.

2. Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Ciri-ciri kebijakan publik menurut Wahab (2012: 20) yaitu:

- a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang sengaja dilakukan dan mengarah pada tujuan tertentu, daripada sekedar sebagai bentuk perilaku atau tindakan menyimpang yang serba acak (*at random*), asal-asalan, dan serba kebetulan. Misalnya, kebijakan pembangunan atau kebijakan sosial dalam sistem-sistem politik modern, bukan merupakan

tindakan yang serba kebetulan atau asal-asalan, melainkan tindakan yang direncanakan (*by planned*).

- b. Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, dan bukan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri. Misalnya, kebijakan tidak hanya mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti dengan keputusan-keputusan/petunjuk-petunjuk teknis dengan lebih detail dan bersangkut paut pada proses implementasi dan mekanisme pemaksaan pemberlakunya.
- c. Kebijakan itu ialah apa yang nyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu. Misalnya, dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, menghapus kemiskinan, memberantas korupsi, memberantas buta aksara, menggalakkan program keluarga berencana, dan menggalakkan perumahan rakyat bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah.
- d. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Dalam bentuk positif, kebijakan publik mencakup bentuk dan tindakan pemerintah dalam memengaruhi penyelesaian atas masalah tertentu. Sedangkan dalam bentuk negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan para pejabat pemerintah untuk tidak bertindak, atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah dimana campur tangan pemerintah sangat dibutuhkan.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik jelas berkaitan dengan keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau para pejabat agar bertindak terhadap segala kebutuhan rakyat.

3. Jenis-Jenis Kebijakan

Anderson (Subarsono, 2013: 20) menjabarkan jenis-jenis kebijakan sebagai berikut:

a. Kebijakan substantif vs kebijakan procedural

Kebijakan substantif adalah kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, seperti kebijakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), kebijakan Raskin (Beras Miskin). Sedangkan kebijakan procedural adalah sebagaimana kebijakan substantif tersebut dijalankan.

b. Kebijakan distributif vs kebijakan regulatori vs kebijakan re-distributif

Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan, kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, kepemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

c. Kebijakan material vs kebijakan simbolis

Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya komplet pada kelompok sasaran. Sedangkan, kebijakan

simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.

- d. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*)

Kebijakan public goods adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan, kebijakan privat goods adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

4. Tahap-Tahap Pembuatan Kebijakan

Proses pembuatan kebijakan adalah “serangkaian aktivitas *intelektual* yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat *politis*”

Dunn (2003: 22). Aktivitas politis tersebut dijelaskan dalam proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan (evaluasi). Tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan menurut Dunn (2003: 24) sebagai berikut:

- a. Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara

masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

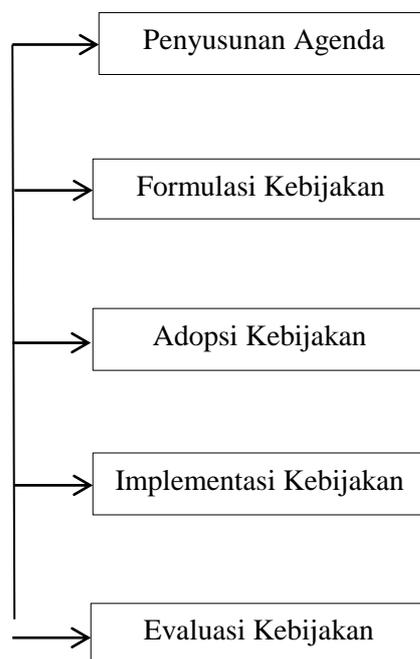
d. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling

bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan (Penilaian Kebijakan)

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, unuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.



Gambar 2.1 Tahap-Tahap Kebijakan

Sumber: Dunn (2003: 24)

5. Kebijakan Pendidikan

Kebijakan Pendidikan tentu tidak luput dari lingkup kebijakan publik. Sebagaimana dipaparkan oleh Subarsono (2013: 3) bahwa “lingkup kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai sektor atau bidang pembangunan, seperti kebijakan publik dibidang pendidikan, pertanian, kesehatan, transportasi, pertahanan dan sebagainya.” Sejalan dengan Fattah dan Latifah (Disas, 2017: 3) menyatakan bahwa “kebijakan publik mengacu pada semua wilayah tindakan pemerintah yang membentang dari kebijakan ekonomi hingga kebijakan yang biasanya merujuk pada kebijakan sosial termasuk pendidikan, kesehatan, dan wilayah kesejahteraan lainnya”. Ini membuktikan sudah sepantasnya pemerintah atau aparat negara membuat kebijakan dan memperluas akses di bidang pendidikan.

Kebijakan dalam dunia pendidikan sering disebut dengan beberapa istilah yang hampir sama. Diantara istilah itu ialah perencanaan pendidikan (*educational planning*), rencana induk tentang pendidikan (*master plan of education*), pengaturan pendidikan (*educational regulation*) dan kebijakan tentang pendidikan (*policy of education*). Kebijakan Pendidikan terdiri dari 2 kata, yaitu “kebijakan” dan “pendidikan”. Kebijakan merupakan suatu tindakan yang dibuat oleh pemerintah atau pejabat negara dengan sasaran rakyat untuk mencapai suatu tujuan bersama. Pendidikan didefinisikan sebagai “usaha yang dijalankan seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental” Sardiman (Hasbullah, 2008: 1). Jadi, kebijakan

pendidikan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dikerjakan oleh pemerintah untuk rakyat agar dapat mencapai kesejahteraan dan kesiapan penghidupan yang lebih tinggi.

Tilaar dan Nugroho (Meilina, Suntoro dan Sowiyah, 2016: 3) mengemukakan bahwa “kebijakan pendidikan merupakan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi dan misi pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk kurun waktu tertentu”. Sejalan dengan Bakry (2010: 4) menjelaskan bahwa “kebijakan pendidikan merupakan pengejawantahan atau perwujudan dari visi dan misi pendidikan bern uansa esensi manusia berdasarkan filsafat manusia dan politik dalam konteks situasi politik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakatnya.” Jadi, dalam konteks ini, kebijakan pendidikan harus dipandang berdasarkan pendidikan sebagai suatu pengetahuan praksis maka kebijakan pendidikan menjadi salah satu input penting dalam perumusan visi dan misi pendidikan.

Kebijakan pendidikan memiliki empat dimensi kebijakan, yaitu dimensi normatif, struktural dan konstituentif. Sebagaimana dijabarkan:

(1) Dimensi normatif terdiri atas nilai standar dan filsafat. Dimensi ini memaksa masyarakat untuk melakukan peningkatan dan perubahan melalui kebijakan pendidikan yang ada. Dimensi tersebut perlu dukungan dari dimensi struktural. (2) Dimensi struktural berkaitan dengan ukuran pemerintah dan satu struktur organisasi, metode dan prosedur yang menegaskan dan mendukung kebijakan bidang pendidikan. (3) Dimensi konstituentif terdiri dari individu, kelompok, kepentingan dan penerima kekuatan untuk proses kebijakan. Devine (Barnoto, 2016: 231)

Pendekatan dan model kebijakan pendidikan yang sering digunakan menurut Linblom (Meilina, Suntoro dan Sowiyah, 2016: 3), yaitu:

- a. Pendekatan analisis, yaitu pendekatan suatu proses membuat kebijakan yang didasarkan pada pengambilan keputusan tentang masalah dan beberapa pilihan kebijakan alternatif atas dasar hasil analisis.
- b. Pendekatan politik, yaitu pembuat kebijakan atas dasar pengambilan keputusan tentang pilihan kebijakan dengan pengaruh kekuasaan, tekanan dan kendali pihak lain.
- c. Pendekatan analisis dan politik, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengatasi kelemahan yang ada pada pendekatan analisis dan pendekatan politik.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan diartikan sebagai proses dari suatu wewenang dalam ranah pendidikan untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi misi pendidikan yang dapat memperluas akses khususnya dibidang pendidikan.

C. Tinjauan Tentang Pendidikan

1. Pengertian Pendidikan

Secara etimologi, istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani yaitu *paedagogie* terdiri dari kata "PAIS" yang artinya anak dan "AGAIN" yang artinya membimbing. Jadi pendidikan atau *paedagogie* berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan kepada anak oleh orang dewasa agar ia dapat menjadi individu yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri.

“Pendidikan bagi kehidupan umat manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan sama sekali mustahil bagi suatu kelompok manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan aspirasi (cita-cita) untuk maju, sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka” (Ihsan, 2008: 2). Pengertian pendidikan selalu mengalami perkembangan meskipun makna dan artinya tidak jauh berbeda. Kadir, Fauzi dkk (2012: 59) memaparkan pendidikan dalam arti luas dan sempit, yaitu:

- (1) Dalam arti luas, pendidikan adalah hidup. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan adalah segala situasi hidup yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hidup.
- (2) Dalam arti sempit, pendidikan adalah sekolah. Pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Pendidikan adalah segala pengaruh yang diupayakan oleh sekolah terhadap anak yang bersekolah agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan dan tugas-tugas sosial mereka.

Hasbullah (2008: 2) menjabarkan pengertian pendidikan menurut para ahli antara lain Langeveld, John Dewey, J.J Rosseau dan Ki Hajar Dewantara.

a. Langeveld

Pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju pada pendewasaan anak itu atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugasnya sendiri.

b. John Dewey

Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia.

c. J.J Rosseau

Pendidikan adalah memberi kita pembekalan yang ada pada masa kanak-kanak, akan tetapi kita membutuhkannya pada waktu dewasa.

d. Ki Hajar Dewantara

Pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak.

Maksudnya, pendidikan adalah penuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.

Dari pengertian pendidikan yang telah dikemukakan para ahli, maka pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses terhadap anak didik agar dapat menjadi individu yang bertanggung jawab, manusiawi dan berfikir kritis guna mencapai tujuan dan kesejahteraan dalam hidup. Pendidikan tidak dapat dihilangkan dari kehidupan manusia dan pendidikan akan terus berkembang. Oleh karena itu, Kebijakan dalam ranah pendidikan harus terus ditingkatkan dan diperbaharui agar akses pendidikan lebih luas, berkurangnya anak-anak putus sekolah dan pembaruan juga dapat membuat pendidikan semakin menarik dan inovatif.

2. Teori-Teori Pendidikan

Teori pendidikan merupakan landasan dalam pengembangan praktik-praktik pendidikan, misalnya pengembangan kurikulum, proses belajar-mengajar dan manajemen sekolah. Kadir, Fauzi dkk (2012: 141) mengemukakan teori-teori pendidikan, yaitu:

a. Teori Pendidikan Klasik (*Classical Education*)

Teori pendidikan klasik berlandaskan pada filsafat klasik, yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan dan meneruskan budaya. Sehubungan dengan itu, kebijakan pendidikan seperti adanya program BOSDA dapat berfungsi sesuai dengan teori ini yang mana program BOSDA bertujuan untuk memberikan bantuan kepada siswa kurang mampu agar mendapatkan pendidikan yang layak sehingga pendidikan akan terus terakses secara luas dengan kata lain semua umat manusia dapat memperoleh pendidikan.

b. Teori Pendidikan Personal

Teori pendidikan ini bertolak dari asumsi bahwa sejak dilahirkan anak telah memiliki potensi-potensi tertentu. Pendidikan harus dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik dengan bertolak dari kebutuhan minat peserta didik. Teori ini pada kaitannya, program BOSDA sebagai suatu kebijakan yang dapat memberikan dana bantuan kepada siswa tidak mampu bisa berperan sebagai pemecahan masalah dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, walaupun peserta didik diberikan dana bantuan untuk bersekolah sudah seharusnya peserta didik menggunakan program ini dengan sebaik-baiknya, seperti mengembangkan potensi-potensi diri sesuai dengan minat individu tersebut sehingga timbullah peserta didik penerima BOSDA yang berprestasi.

c. Teori Pendidikan Interaksional

Pendidikan interaksional yaitu suatu konsep pendidikan yang bertitik tolak dari pemikiran manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dan bekerja sama dengan manusia lainnya. Pendidikan sebagai salah satu bentuk kehidupan juga berintikan kerja sama dan interaksi. Pada kaitannya, teori ini membahas tentang pendidikan yang merupakan interaksi antar manusia yang mana pada program BOSDA pemerintah juga memerlukan interaksi dan kerja sama agar program ini dapat berjalan dengan baik dan dapat berperan sebagai perluasan akses pendidikan guna membantu peserta didik kurang mampu untuk memperoleh pendidikan.

3. Faktor-Faktor Pendidikan

Menurut Barnadib (Hasbullah, 2008: 10) pembuatan mendidik dan dididik memuat faktor-faktor tertentu yang memengaruhi dan menentukan, yaitu:

- a. Adanya tujuan yang hendak dicapai
- b. Adanya subjek manusia (pendidik dan anak didik) yang melakukan pendidikan
- c. Yang hidup bersama dalam lingkungan hidup tertentu (*milieu*).
- d. Yang menggunakan alat-alat tertentu untuk mencapai tujuan.

Antara faktor yang satu dan faktor lainnya, tidak dapat dipisahkan karena semua faktor-faktor tersebut saling berpengaruh dan memengaruhi.

4. Tujuan Pendidikan

Langeveld (Ahmadi dan Uhbiyati, 2015: 103) mengemukakan serangkaian tujuan pendidikan, sebagai berikut:

a. Tujuan Umum (tujuan lengkap dan tujuan total).

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam “usaha-usaha pendidikan” maka tujuan umum pendidikan adalah kedewasaan anak didik. Hal ini berarti bahwa semua aktivitas pendidikan seharusnya diarahkan ke sana, demi tercapainya tujuan umum.

b. Tujuan Khusus.

Untuk mencapai tujuan umum, pasti ada suatu tujuan khusus. Untuk mengkhhususkan tujuan umum tersebut, dibutuhkan beberapa pandangan dasar (prinsip) yaitu:

- 1) Kita harus melihat kemungkinan-kemungkinan, kesanggupan kesanggupan, pembawaan, umur, dan jenis kelamin didik.
- 2) Kita harus melihat lingkungan dan keluarga anak didik.
- 3) Kita harus melihat tujuan anak didik dalam rangkaian kemasyarakatannya.
- 4) Kita harus melihat diri kita sendiri selaku pendidik.
- 5) Kita harus melihat tugas lembaga pendidikan dimana anak itu dididik
- 6) Kita harus melihat tugas bangsa dan umat manusia dewasa ini dan disini.

Dengan adanya berbagai pandangan dasar tersebut, tujuan umum pendidikan akan memperoleh corak yang khusus dengan tidak mengubah sifat tujuan umum.

c. Tujuan tak lengkap (masih terpisah-pisah).

Ini adalah tujuan yang berkaitan dengan kepribadian manusia dari satu aspek saja, yang berhubungan dengan nilai-nilai hidup tertentu.

Misalnya kesusilaan, keagamaan, keindahan, kema syarakatan, pengetahuan, dan sebagainya. Dari masing-masing aspek itu mendapat giliran penanganan dalam usaha pendidikan, atau maju bersama-sama secara terpisah.

d. Tujuan sementara.

Tujuan sementara ini adalah titik-titik perhatian sementara, yang kesemuanya itu sebagai persiapan, untuk menuju kepada tujuan umum tersebut, Misalnya : membiasakan anak suka ber sih, tidak membuang air kecil di sembarang tempat, membiasa kan anak berbicara sopan, melatih anak mengerjakan sesua yang bermanfaat, dan sebagainya.

e. Tujuan *insidental*.

Tujuan ini sesungguhnya adalah tujuan yang terpisah dari tujuan umum, tetapi kadang-kadang mengambil bagian dalam menuju ke tujuan umum. Misalnya, anak kadang-kadang kita makan bersama-sama (karena merasa perlu), tetapi lain kali tidak. Anak kadang-kadang kita marahi (karena melakukan anak kesalahan), tetapi lain kali tidak demikian, dan sebagainya.

f. Tujuan *Intermedier*.

Tujuan ini adalah tujuan yang berkaitan dengan penguasaan sesuatu pengetahuan atau keterampilan demi tercapainya tujuan sementara.

Misalnya, anak belajar membaca, menulis, matematika, berhitung, dan sebagainya.

D. Tinjauan Tentang Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)

Program BOSDA merupakan suatu kebijakan dari pemerintah daerah provinsi yang masuk dalam bidang pendidikan guna untuk membantu masyarakat ekonomi bawah memperoleh pendidikan yang bermutu. Program BOSDA dibentuk sebagai pendamping program BOSNAS yang diperuntukan untuk menutupi kesenjangan dana yang belum terpenuhi dari BOSNAS, maka program BOSDA ini diharapkan mampu memenuhi atau minimal mampu memberikan alternative yang baik untuk mengatasi kekurangan-kekurangan dari program BOSNAS. Sebelumnya program bagi peserta didik tidak mampu dikenal dengan nama program bina lingkungan (biling) yang dijalankan oleh walikota, kemudian program ini kerap menimbulkan pro-kontra karena pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No.1 Tahun 2012 disebutkan bahwa kuota bina lingkungan adalah 30% sedangkan pada tahun 2015 kuota bina lingkungan mencapai 70% yang jelas melanggar perda yang telah ditetapkan kemudian hal itu disebut sebagai penyebab mutu pendidikan di Lampung menurun. Karena asumsi tersebut Program Biling digantikan dengan program BOSDA dengan tujuan mengembalikan kualitas pendidikan khususnya di Provinsi Lampung.

1. Pengertian Program BOSDA

Bantuan Operasional Sekolah Daerah atau disingkat BOSDA merupakan program yang ditujukan kepada peserta didik yang tergolong keluarga tidak mampu. Pada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 menyebutkan bahwa:

BOSDA adalah Program Pemerintah Provinsi Lampung berupa pemberian dan langsung ke Satuan Pendidikan Menengah baik Negeri maupun Swasta pada Kota Bandar Lampung dimana besaran dana bantuan yang diterima di sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa tidak mampu masing-masing sekolah dan satuan biaya (Unit Cost) bantuan sedangkan Satuan Pendidikan Menengah Negeri Untuk Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan berdasarkan jumlah siswa pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan jumlah siswa tidak mampu pada Satuan Pendidikan Menengah Swasta.

BOSDA memberikan dana untuk membantu sekolah melengkapi dana BOS pusat sebagai bentuk keberpihakan pemenuhan pembiayaan pendidikan menengah. Tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Pasal 12 Ayat (1) butir d yang berisi “setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya” Hal ini sesuai dengan program BOSDA yang mana program ini memberikan bantuan biaya kepada keluarga kurang mampu. Jadi dapat disimpulkan program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) ini merupakan Program yang ditangani oleh gubernur Lampung yang diartikan sebagai bantuan kepada siswa/i yang digolongkan sebagai keluarga kurang

mampu dengan bantuan yang diberikan berupa pembiayaan yang diberikan kepada Satuan Pendidikan.

2. Tujuan Program BOSDA

Pemerintah memilih melakukan sesuatu harus ada tujuan dibaliknya.

Tujuan Program BOS secara luas ialah:

(1) Menggratiskan seluruh siswa tidak mampu di tingkat satuan pendidikan dari beban biaya operasional sekolah dengan bantuan pendanaan ke satuan pendidikan, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta. (2) meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah negeri maupun swasta.

Dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2017, Secara Umum Program BOSDA SMA/SMK bertujuan untuk membantu pembiayaan pendidikan dalam rangka program pendidikan menengah universal yang bermutu. Secara khusus program BOSDA SMA/SMK bertujuan sebagai berikut:

- a. Membantu biaya operasional sekolah
- b. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan Negeri/Swasta;
- c. Memberikan kesempatan yang setara bagi peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu

3. Sasaran Program BOSDA

Sasaran bantuan BOSDA Provinsi Lampung adalah Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Swasta di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan. Dengan sasaran program di sekolah ditujukan kepada peserta didik tidak mampu.

4. Kriteria Penerima Program BOSDA

Ketentuan satuan pendidikan yang dapat menerima dana BOSDA Provinsi Lampung, yaitu:

- a. Seluruh SMA/SMK Negeri/Swasta yang telah mempunyai izin operasional/pendirian dan menyampaikan permohonan BOSDA Provinsi Lampung SMA/SMK Kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Sekolah penerima dana BOSDA harus mengikuti ketentuan petunjuk teknis BOSDA yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Lampung;
- c. Sekolah yang menolak dana BOSDA harus mendapat persetujuan orang tua siswa, komite sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin/tidak mampu di sekolah tersebut dan menyampaikan surat permohonan penolakan kepada Gubernur Lampung dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
- d. Sekolah Negeri dan Swasta penerima dana BOSDA wajib melaksanakan program ramah sosial dengan cara mengidentifikasi dan merekrut calon siswa penerima dana BOSDA yang memiliki minat dan potensi untuk mengikuti pendidikan di sekolah yang bersangkutan dengan mekanisme verifikasi oleh tim yang dibentuk oleh sekolah;
- e. Sekolah Negeri dan Swasta penerima dana BOSDA melakukan sosialisasi dan verifikasi siswa calon penerima dana BOSDA dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) Melakukan pendataan peserta didik yang mengajukan menjadi penerima dana BOSDA

- 2) Melakukan kunjungan atau visitasi dalam rangka verifikasi calon penerima dana BOSDA dengan membawa Instrumen Verifikasi calon penerima dana BOSDA.
- 3) Melakukan rapat tim verifikasi dalam rangka penetapan calon penerima dana BOSDA
- 4) Membuat surat keputusan berdasarkan rapat tim verifikasi untuk siswa penerima dana BOSDA

5. Persyaratan Penerima Program BOSDA

Persyaratan Penerima Program BOSDA dari pemerintah Provinsi Lampung untuk SMK Negeri dan Swasta Kota Bandar Lampung (Website SMK Negeri 1 Bandar Lampung) ialah:

- a. Berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu;
- b. Mengajukan surat permohonan yang disiapkan oleh sekolah;
- c. Menyerahkan fotocopy Kartu keluarga sebanyak 3 lembar dan menunjukkan aslinya;
- d. Menyerahkan fotocopy KTP sebanyak 3 lembar dan menunjukkan aslinya;
- e. Menyerahkan fotokopy Kartu Indonesia Pintar (Kartu Sejenisnya) sebanyak 3 lembar dan menyerahkan aslinya;
- f. Menyerahkan foto berwarna keadaan rumah dari 3 sisi : tampak depan, samping kanan, dan samping kiri;
- g. Menyerahkan denah rumah;

- h. Bersedia untuk di verifikasi oleh tim BOSDA dari dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Lampung dan Orangtua harus berada dirumah pada saat verifikasi.

Hal-hal diatas merupakan persyaratan yang harus dilengkapi bagi keluarga yang ingin mendapatkan dana BOSDA.

6. Prinsip Pemberian Program BOSDA

Prinsip pemberian program BOSDA sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2017, dijabarkan:

- a. Dana BOSDA SMA/SMK diberikan untuk memenuhi kekurangan atau melengkapi keperuntukan BOS yang dialokasikan oleh pemerintah pusat maupun dana tidak terikat lainnya;
- b. Dana BOSDA SMA/SMK diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan dengan alasan apapun serta pihak manapun;
- c. Dana BOSDA SMA/SMK harus dikelola secara transparan, efisien, efektif dan akuntabel;
- d. Standar pembelanjaan mengacu kepada kewajaran harga setempat atau batas yang telah ditetapkan pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi;
- e. Standar perpajakan mengacu sistem perpajakan yang berlaku;
- f. Dana BOSDA SMA/SMK dalam suatu periode tidak harus dipergunakan pada periode tersebut;
- g. Kepala sekolah mencatat setiap transaksi dana BOSDA pada format yang telah ditentukan;

- h. Jika terdapat sisa dana BOSDA SMA/SMK tahun sebelumnya, diharuskan mengembalikan dana ke Kas Daerah dengan dibuktikan Surat Tanda Terima Setoran;
- i. Apabila penyaluran dana BOSDA mengalami keterlambatan diterima di rekening sekolah maka dana BOSDA dapat berlaku surut.

7. Mekanisme Penetapan Alokasi Program BOSDA

Mekanisme Penetapan Alokasi BOSDA sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2017, ialah:

- a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi menerbitkan Surat Keputusan Penerima Dana BOSDA untuk setiap satuan pendidikan berdasarkan alokasi biaya BOSDA yang telah ditetapkan untuk setiap Kabupaten/Kota;
- b. Dalam hal keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi tentang daftar penerima dan jumlah dana BOSDA sebagaimana dimaksud angka 1 belum memperhitungkan jumlah siswa tahun pelajaran baru, dilakukan penyesuaian untuk selanjutnya dilakukan perubahan dengan mengacu mekanisme penyusunan anggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Penetapan alokasi BOSDA setiap satuan pendidikan mengacu kepada Kriteria Penerimaan Dana BOSDA yang disesuaikan dengan Dapodikdasmen tentang siswa tidak mampu pada semester beejalan;
- d. Berdasarkan alokasi dana BOSDA yang ditetapkan pada satuan pendidikan, Kepala Sekolah wajib menyusun RKAS yang bersumber

dari dana BOSDA dan menyampaikan dokumen dimaksud kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

Ketentuan pembiayaan operasional sebagaimana dimaksud ditetapkan berdasarkan azas kepatuhan, kewajaran, disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Tinjauan Tentang Perluasan Akses Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan mutlak sebagai bahan dasar bagi seluruh umat manusia untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang luas.

Pendidikan menjadi landasan yang kuat untuk memperkokoh pengetahuan demi kemajuan bangsa di masa depan. Pendidikan memiliki empat pilar utama yaitu “Belajar untuk belajar (*learning how to learn*), belajar untuk mengetahui (*learning how to know*), belajar untuk menjadi (*learning how to be*), dan belajar untuk menjadi hidup (*learning how to live together*)” yang akan menciptakan masyarakat terpelajar dan menjadi syarat terbentuknya masyarakat maju, mandiri, demokratis, sejahtera dan bebas kemiskinan.

Pemerintah Indonesia “sejak tahun 1984 secara formal telah mengupayakan pemerataan dan perluasan pendidikan Sekolah Dasar, dilanjutkan dengan wajib belajar pendidikan sembilan tahun mulai tahun 1994.” Saud (Badruzzaman, 2013: 2). Perluasan akses pendidikan lebih mengacu kepada perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan pada awalnya dengan program beasiswa. Program beasiswa dibentuk untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar bagi peserta didik yang tidak mampu dan berpotensi akademis dengan memberi bantuan berupa biaya pendidikan. Program

beasiswa ini semakin intensif dan mengalami pembaruan apalagi memandang perekonomian ketika terjadi krisis ekonomi. Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004 (TAP MPR N0. IV/MPR/1999) mengamanatkan, antara lain:

(1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia yang berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan, (2) meningkatkan mutu lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk menetapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga dan seni.

Perluasan mutu pendidikan terus diupayakan oleh pemerintah. Layanan pendidikan yang bermutu harus dapat diakses oleh semua masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 Ayat 1 yang menyatakan “pemerintah dan pemerintahan daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.” Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara seperti jaminan wajib belajar dua belas tahun. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing di masa depan diharapkan dapat memberikan dampak bagi perwujudan eksistensi manusia dan interaksinya sehingga dapat hidup bersama dalam keragaman sosial dan budaya.

Untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, terus dilakukannya peningkatan jumlah dan kualitas pendidik juga tenaga kerja kependidikan termasuk melalui penyediaan guru bantu sementara, penyediaan materi bahan ajar terutama buku pelajaran, alat peraga pendidikan, penguatan pendidikan kecakapan hidup dan penataan hubungan lembaga pendidikan dengan dunia industri dan dunia usaha. Bappenas (Bab 27)

Dalam memperluas akses pendidikan, diarahkan pada upaya perluasan daya tampung satuan pendidikan serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda, baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal, tingkat kemampuan intelektual dan kondisi fisik. “Dalam rangka memperluas akses pendidikan, telah dilakukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan partisipasi pendidikan sekaligus menurunkan kesenjangan taraf pendidikan antar kelompok masyarakat antara lain melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dengan memberikan perhatian lebih besar kepada daerah tertinggal.” Bappenas (Bab 27) tentang peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas.

Perluasan akses pendidikan sesuai dalam Depdiknas (Kintamani, 2008: 1076) dijelaskan bahwa:

Perluasan akses pendidikan merupakan isu strategi dan prioritas yang pertama dalam pembangunan pendidikan nasional. Perluasan akses pendidikan dimaksudkan agar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan itu tidak dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial ekonomi, agama dan lokasi geografis.

Perluasan akses pendidikan merupakan perluasan kesempatan bagi peserta didik tidak mampu agar dapat mengakses pendidikan dengan program yang telah dibuat pemerintah. Pada perkembangannya, pemerataan dan perluasan akses pendidikan itu diserahkan kepada program kebijakan di bidang pendidikan seperti program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Program BOSDA merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan harapan masyarakat terhadap perluasan pendidikan. BOSDA merupakan program yang

dibuat pemerintah daerah dengan tujuan memperluas akses pendidikan yang mana memberikan bantuan dana kepada siswa tidak mampu pada satuan menengah pendidikan negeri maupun swasta. BOSDA dalam penyelenggaraan pendidikan diharapkan dapat membantu peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang bebas biaya dan bermutu. Program BOSDA dalam pemanfaatannya memberikan kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh masyarakat khususnya keluarga tidak mampu, yang dirumuskan dalam kebijakan pendidikan mencakup: peningkatan mutu, relevansi, daya saing, tata kelola, akuntabilitas serta pencitraan publik. Dengan tujuan utama yaitu untuk pemerataan dan perluasan akses dibidang pendidikan.

Pilar kebijakan dibidang pendidikan nasional yang dikemukakan oleh Kintamani (2008: 1076) terdiri dari “tiga kebijakan, yaitu 1) Pemerataan dan perluasan akses pendidikan; 2) Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan; dan 3) Manajemen pendidikan nasional.” Perluasan akses pendidikan masuk kedalam pilar kebijakan pendidikan, berarti dapat dikatakan bahwa perluasan akses pendidikan merupakan hal penting untuk kelangsungan pendidikan nasional yang akan menjadi bahan bagi pemerintah untuk fokus terhadap kebijakan dibidang pendidikan.

Dalam aspek pemerataan dan perluasan, tujuan sasaran pengembangan pendidikan dijelaskan bahwa:

Tujuan dan sasaran pengembangan pendidikan harus diarahkan pada upaya meningkatkan daya tampung pada setiap jenjang satuan pendidikan, dengan memberikan kesempatan kepada semua penduduk usia sekolah untuk memperoleh pendidikan dengan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat yang *pluralistik* yang disertai dengan

tanggung jawab dalam memberikan konsekuensi yang harus ditanggung pemerintah masyarakat. Irianto (2012: 9)

Tujuan ini akan berlanjut sampai kepada upaya dalam meningkatkan angka melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi dengan disertai bekal kemampuan dasar yang lebih memadai dan berbagai kemudahan baik bagi peserta didik, masyarakat dan sekolah.

Perluasan akses pendidikan mencakup “indikator atau dua aspek penting yaitu *equality* dan *equity*. *Equality* atau persamaan mengandung arti persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, sedangkan *equity* bermakna keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama di antara berbagai kelompok dalam masyarakat” Badruzzaman (2013: 4)

Kebijakan perluasan akses pendidikan ini menekankan bahwa setiap orang tanpa memandang asal-usulnya mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada semua jenis, jenjang, maupun jalur pendidikan. Sasaran kebijakan ini adalah untuk menciptakan keadilan dalam pelayanan pendidikan untuk semua segmen masyarakat. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan dimaksudkan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan yang merata. Kintamani (2008: 1076)

Dari penjabaran tentang perluasan akses pendidikan, dapat disimpulkan bahwa perluasan akses pendidikan merupakan upaya memperluas kesempatan untuk mendapatkan pendidikan formal yang layak dan bermutu bagi setiap warga negara khususnya bagi keluarga yang tidak mampu secara finansial.

F. Kajian Penelitian Yang Relevan

1. Nasional

Penelitian Meltiana tahun 2017 tentang “Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Mutu

Pendidikan (Studi Kasus Di SMA Negeri 1 Sendawar Kabupaten Kutai Barat) ” menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa setiap pembelian menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang ada di SMA Negeri 2 Sendawar telah dilakukan dengan cukup baik. Setiap barang yang menjadi aset sekolah dan menjadi barang inventaris sekolah, semua sudah tercantum dalam buku inventaris, dan temuan di lapangan menunjukkan pihak masyarakat sangat senang dengan adanya implementasi Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk para sekolah menengah atas dari pemerintah kepala sekolah, secara tidak langsung akan meringankan beban dalam segi biaya sekolah.

Penelitian yang dilakukan oleh Meltiana ini relevan sebab pada penelitian ini, menggunakan pendekatan yang sama yaitu deskriptif kualitatif dan membahas tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Tetapi, penelitian dari Meltiana ini meneliti tentang implementasi kebijakan program BOSDA sedangkan peneliti lebih condong kepada peran program BOSDA. Penelitian ini sama-sama dilakukan di Sekolah Menengah tetapi penelitian ini di Sekolah Menengah Atas (SMA) sedangkan peneliti di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Lalu pada penelitian ini variabel Y merupakan peningkatan mutu pendidikan sedangkan variabel Y yang peneliti gunakan ialah perluasan akses pendidikan.

2. Lokal

Penelitian Su'ada Tahun 2015 tentang “Implementasi Program Bina Lingkungan Dalam Rangka Meningkatkan Akses Pendidikan Bagi

Masyarakat Miskin Di Kota Bandar Lampung Tahun 2014” menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan model analisis Grindell. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program bina lingkungan di Kota Bandar Lampung masih belum optimal dikarenakan masih ada penyimpangan dalam menjalankan program ini dan manfaat program ini belum sepenuhnya dirasakan oleh target sasaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Su'ada ini relevan sebab pada penelitian ini meneliti tentang Akses Pendidikan dengan menggunakan metode yang sama yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian S2 atau thesis. Tetapi, pada penelitian Su'ada ini di variabel (X) meneliti tentang implementasi program Bina Lingkungan yang sekarang berubah menjadi Program BOSDA sedangkan peneliti lebih condong kepada peran program BOSDA. Pada variabel (Y) Penelitian Su'ada ini meneliti tentang peningkatan akses pendidikan sedangkan peneliti lebih ke perluasan akses pendidikan. Lalu, tempat penelitian thesis ini lebih luas yaitu di Kota Bandar Lampung sedangkan tempat penelitian peneliti di sekolah tepatnya SMK Negeri 1 Bandar Lampung.

G. Kerangka Pikir

Pada setiap penelitian, dibutuhkan adanya kerangka pikir untuk menentukan fokus dan arah penelitian agar sesuai dengan penelitian yang akan dikaji.

Pendidikan menempatkan posisi central dalam kehidupan manusia, oleh karena itu siapapun ingin dapat bisa meraih pendidikan yang bermutu dan berkualitas.

Pendidikan adalah suatu kebutuhan mutlak bagi manusia agar dapat berilmu

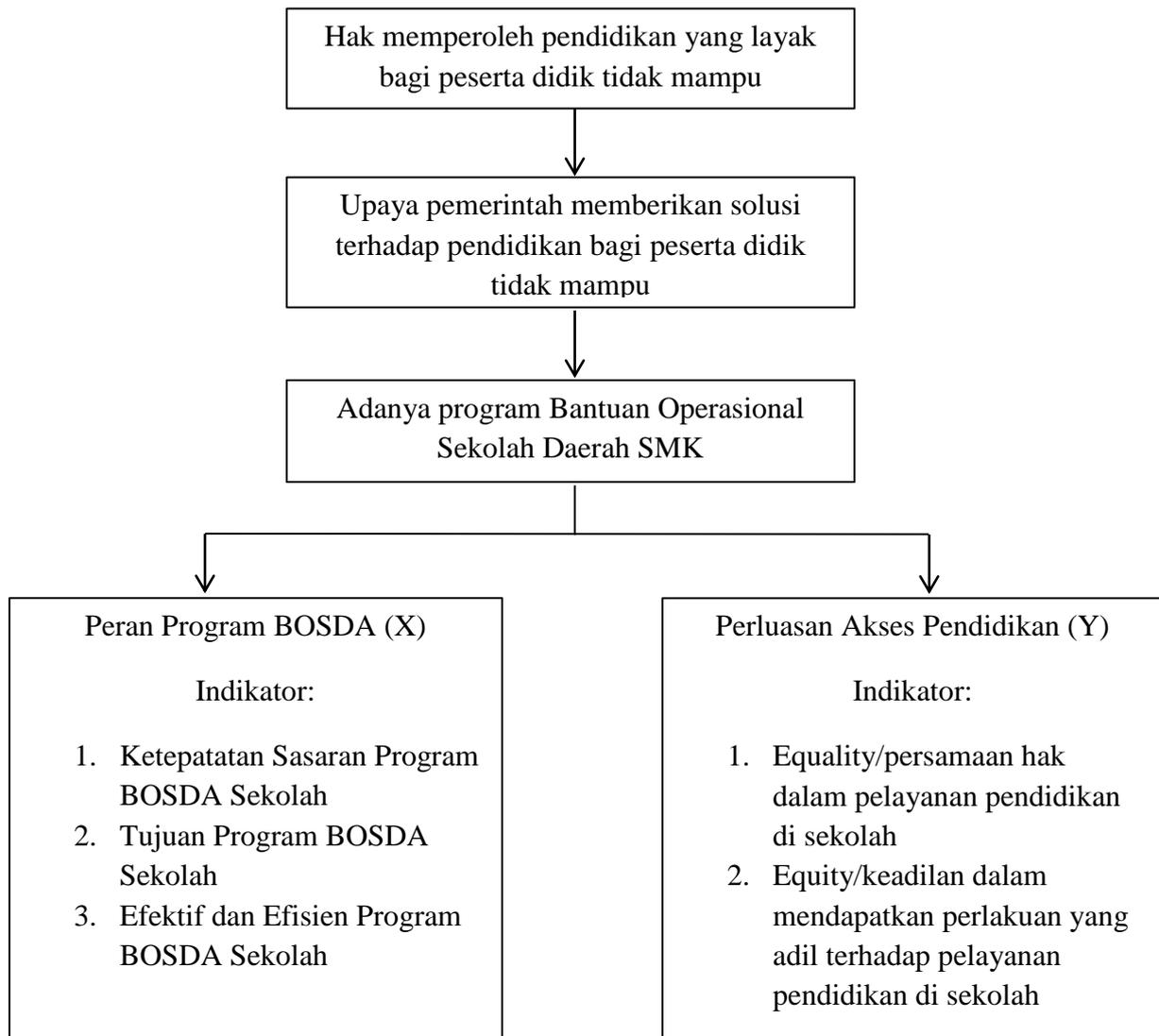
untuk bekal kesejahteraan hidup di masa depan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “Hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan tanpa kecuali. Setiap warga negara berhak atas pendidikan dan pengembangan ilmu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.” Pentingnya pendidikan menuntut siapapun umat manusia dari berbagai kalangan agar dapat mendapatkan pendidikan bahkan dari keluarga tidak mampu sekalipun. Maka dari itu, diperlukan adanya perluasan akses dibidang pendidikan guna memberikan kesempatan kepada anak dari keluarga tidak mampu untuk dapat memperoleh pendidikan.

Hak menikmati pendidikan yang murah, berkualitas dan bermutu merupakan hak dasar dari Hak Asasi Manusia dan pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhinya. Rendahnya pendidikan khususnya bagi masyarakat kurang mampu ialah tingginya biaya pendidikan. Baik itu biaya secara langsung ataupun tidak langsung. Dalam upaya memberikan kesempatan memperoleh pendidikan bagi keluarga tidak mampu, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan dibidang pendidikan yang dapat menjadi solusi atas masalah pendidikan khususnya dalam sektor biaya pendidikan. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), program ini adalah Program Pemerintah Provinsi Lampung yang berupa pemberian dana langsung kepada satuan pendidikan baik negeri maupun swasta dengan sasarannya merupakan anak dari keluarga tidak mampu khususnya bagi satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Tujuan program ini adalah untuk membantu mengentaskan kemiskinan melalui kemudahan dalam akses

pendidikan bagi masyarakat kurang mampu agar mendapat kehidupan masa depan yang lebih baik.

Masyarakat mengharapkan program BOSDA ini dapat berjalan efektif dan efisien sehingga dapat berguna dalam memperluas akses pendidikan tanpa mengenal kalangan dari keluarga mampu ataupun tidak. Apalagi, bagi peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) biaya untuk bersekolah di SMK tidaklah sedikit, mengingat keperluan mendasar mereka seperti seragam sekolah termasuk seragam jurusan, buku pelajaran pendukung, bimbingan sekolah, serta biaya praktik dan pembelian alat yang menuntut untuk mengeluarkan biaya lebih. Karena itu diharapkan agar BOSDA terus menjangkau bantuan ke satuan pendidikan menengah kejuruan. Perluasan akses pendidikan sendiri mengedepankan indikator atau aspek *equality* dan *equity*. *Equality* atau persamaan mengandung arti persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, sedangkan *equity* bermakna keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Aspek ini dijadikan sebagai pendukung bagi terciptanya perluasan akses pendidikan agar dapat berjalan dengan baik. Maka dari itu, mengingat pendidikan merupakan hal yang sangat penting kebijakan dibidang pendidikan seperti BOSDA sangatlah diperlukan dalam pemberian hak dasar dan kesempatan mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas bagi siswa tidak mampu.

Berdasarkan uraian diatas, diduga bahwa program BOSDA dapat berperan dalam perluasan akses pendidikan maka dapat di tarik kerangka fikir sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Pikir

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya memiliki peran penting dalam melakukan suatu penelitian. Penggunaan metode yang tepat dan sesuai dengan masalah akan menghasilkan suatu solusi yang cukup untuk mengatasi masalah yang diteliti.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, hal ini karena akan memberikan gambaran tentang permasalahan melalui analisis dengan menggunakan pendekatan ilmiah sesuai dengan keadaan sebenarnya dilapangan. Metode deskriptif menurut Nazir (Prastowo, 2016: 186) adalah “suatu metode yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa di masa sekarang” disisi lain, “penelitian deskriptif tidak dimaksud untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan” Arikunto (2006: 234)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Moleong (Herdiansyah, 2012: 9) mengemukakan “penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain

sebagainya”. Metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian Ilmu-ilmu Sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.

Metode ini dipergunakan karena meneliti masalah yang sedang berlangsung pada masa sekarang terutama tentang aspek pendidikan dengan menjelaskan dan memahami apa yang ada. Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui fakta tentang peran program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dalam perluasan akses pendidikan di SMK Negeri 1 Bandar Lampung. Mengingat pada saat ini pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk diperluas aksesnya sehingga siapapun dapat memperoleh pendidikan sekalipun dari keluarga tidak mampu.

B. Subjek Penelitian atau Informan

Secara spesifik, subjek penelitian adalah informan. “Informan adalah “orang dalam” pada latar penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar (lokasi atau tempat) penelitian” Moleong (Prastowo, 2016: 195).

Dalam penentuan Subjek Penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang dipilih dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan

peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2017: 300).

Disisi lain “*Propeseful Sampling* merupakan ciri-ciri yang dimiliki oleh subjek yang dipilih karena ciri-ciri tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan” Herdiansyah (2012: 106). Subjek penelitian atau Informan yang dipilih haruslah memiliki syarat bahwa ia merupakan orang yang mengenal subyek dengan baik dan mengetahui karakteristik yang diteliti dari subyek penelitian.

Berdasarkan pertimbangan, maka subyek dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bandar Lampung
2. Bendahara BOSDA SMK Negeri 1 Bandar Lampung
3. Guru atau tenaga pendidik SMK Negeri 1 Bandar Lampung
4. Peserta didik Kelas XI Penerima program BOSDA di SMK Negeri 1 Bandar Lampung

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri. “Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya” (Sugiyono, 2017: 306).

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan informasi tentang data yang diperlukan dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil.

Peneliti berfungsi sebagai alat. “instrument atau alat yang dimaksud adalah semenjak awal hingga akhir penelitian, peneliti sendiri yang berfungsi penuh atau peneliti sendiri yang terlibat aktif dalam penelitian yang dilakukan”

Herdiansyah (2012: 21). Peneliti bertindak sendiri untuk melakukan pengamatan, wawancara, dan melakukan catatan lapangan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian. Instrument dalam penelitian ini disusun dan dikembangkan oleh peneliti dengan bimbingan dosen pembimbing.

D. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bandar Lampung. Pemilihan lokasi ini dilatarbelakangi karena SMK Negeri 1 Bandar Lampung merupakan salah satu sekolah yang menerima dana BOSDA. Penetapan lokasi penelitian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang mendukung tujuan peneliti untuk mengetahui peran program BOSDA dalam perluasan akses pendidikan. Selain itu, lokasi dalam penelitian ini dekat dengan tempat tinggal peneliti sehingga menghemat biaya yang dikeluarkan dan dapat mempermudah peneliti dalam penelitian dan pengumpulan data.

2. Waktu Penelitian

Penelitian telah dilaksanakan pada tanggal 16 bulan Oktober tahun 2018, setelah peneliti mendapatkan surat ijin untuk melakukan penelitian pendahuluan dalam mengumpulkan data.

E. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai Data. Data utama pada penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti sumber data tertulis. Data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Data utama atau primer merupakan dokumen yang didapatkan peneliti langsung dari sumber utama yaitu Kepala Sekolah, guru/tenaga pendidik, dan bendahara BOSDA SMK Negeri 1 Bandar Lampung. Data utama dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan program BOSDA seperti Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2017, data peserta didik yang mendapatkan dana BOSDA di SMK Negeri 1 Bandar Lampung serta data tenaga pendidik yang ada. Data sekunder di kumpulkan peneliti sebagai penunjang dari data primer. Data-data sekunder didapatkan peneliti melalui dokumentasi-dokumentasi saat observasi ke SMK Negeri 1 Bandar Lampung. Data sekunder ini sangat menunjang dan memperkuat data-data primer. Data sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kegiatan siswa penerima program BOSDA disekolah serta sumber data sekunder lain seperti berita surat kabar, website, artikel, dan referensi-referensi yang menjadi panduan tentang Perluasan Akses Pendidikan ini selama proses penelitian agar dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data valid dan lengkap yang dapat mendukung keberhasilan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah:

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Observasi didefinisikan “sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu” Cartwright (Herdiansyah, 2012: 131). Tujuan observasi adalah untuk mendeskripsikan lingkungan yang diamati. Observasi dilakukan pengamatan langsung untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.

Pengambilan data yang dilakukan oleh peneliti dengan datang langsung ke lokasi penelitian yaitu SMK Negeri 1 Bandar Lampung yang diamati tanpa ikut serta dalam kegiatan di lokasi penelitian agar dapat melakukan pengamatan secara nyata yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh dari hasil observasi berupa deskripsi tentang Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah. Mencari tahu bagaimana peran program BOSDA yang dilakukan di Sekolah Menengah Kejuruan terutama dalam konteks memperluas akses pendidikan yang pada dasarnya ialah pemberian kesempatan pendidikan bagi anak-anak tidak mampu. Seluruh kegiatan ini harus di amati tanpa ada yang terlewat sedikitpun agar peneliti dapat menemukan hal-hal yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data utama dalam penelitian kualitatif. Wawancara adalah suatu proses komunikasi antara peneliti dan informan dengan cara tanya jawab dengan pertanyaan yang berkaitan tentang penelitian agar ditemukannya sebuah informasi yang berguna bagi penelitian. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dibutuhkan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang akan diteliti.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan bentuk wawancara semi-terstruktur (*Semistruktur Interview*). Bentuk wawancara semi-terstruktur memiliki pertanyaan terbuka yang masih dalam batas dan alur pembicaraan. Dalam melaksanakan wawancara semi-terstruktur diperlukan sebuah pedoman wawancara yang menjadi sebuah patokan dalam pelaksanaannya. “Tujuan wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya” Sugiyono (2017: 320).

Dengan wawancara semi-terstruktur, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh pendidikan.

Teknik wawancara ini membantu peneliti dalam memperoleh informasi secara langsung dari sumber yang dipercaya. Adapun narasumber di wawancara oleh peneliti adalah kepala sekolah SMK Negeri 1 Bandar Lampung, guru atau tenaga pendidik SMK Negeri 1 Bandar Lampung, serta peserta didik kelas XI penerima program BOSDA di SMK Negeri 1

Bandar Lampung. Kepala sekolah SMK Negeri 1 Bandar Lampung di wawancara untuk mendapatkan informasi secara jelas, karena dapat dipastikan bahwa kepala sekolah adalah sumber yang tepat. Guru atau tenaga pendidik dijadikan sebagai narasumber yang harus di wawancara agar peneliti dapat mengetahui bagaimana peran program BOSDA terutama di SMK. Peserta didik penerima program BOSDA menjadi narasumber dalam wawancara karena dapat memperkaya penelitian yang dilakukan peneliti agar hasilnya lebih jelas.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Pengumpulan dokumen ini mungkin dilakukan untuk mengecek kebenaran atau ketepatan informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancara. “metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda dan sebagainya” Arikunto (2006: 231). Pada penelitian ini peneliti mengambil dokumentasi lebih berupa laporan, catatan-catatan yang berkaitan dengan program BOSDA, serta data-data gambaran tentang sekolah seperti profil sekolah, jumlah siswa penerima program BOSDA dan guru, keadaan siswa dan hal-hal yang dapat menunjang penelitian dengan mencari sumber-sumber di lokasi penelitian.

G. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji keautentikan atau keabsahan data agar hasil penelitian kualitatif yang dilakukan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Uji Kredibilitas data ini memiliki 2 fungsi, yaitu: “(1) melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuan kita dapat dicapai; (2) mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan kita dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti.” Moleong (Prastowo, 2016: 266).

Dalam penelitian ini menggunakan Kritik Sumber dan Triangulasi sebagai pengukuran Uji Kredibilitas.

1. Kritik Sumber

Penelitian ini menggunakan kritik sumber yaitu cara-cara meneliti outensitas data kredibilitas sumber yang diperoleh. Kritik dilakukan dengan Kritik Intern dan Ekstern.

a. Kritik Intern

Kritik intern bertujuan untuk meneliti kebenaran isi (data) sumber data itu. Dengan kritik intern ini peneliti berusaha mendapatkan kebenaran sumber data dengan mengkaji beberapa faktor seperti adanya kesesuaian hasil wawancara dengan observasi dan penelitian yang penulis lakukan di lapangan.

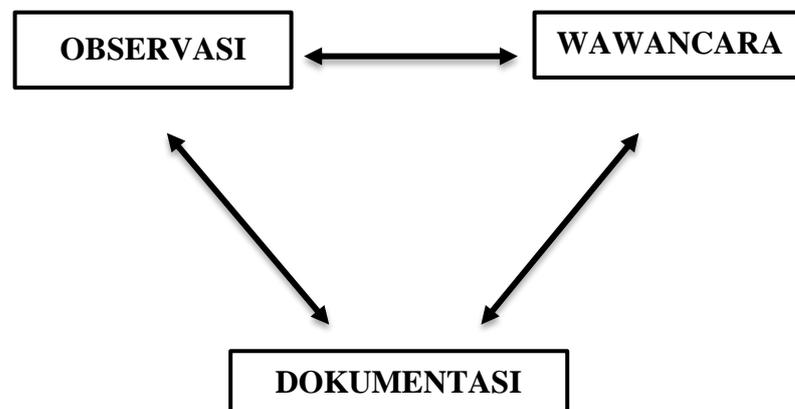
b. Kritik Ekstern

Kritik Ekstern dilakukan untuk mendapatkan tingkat keaslian sumber data guna memperoleh keyakinan bahwa penelitian yang dilakukan menggunakan sumber data yang tepat. Adapun terhadap sumber lisan

peneliti melihat integritas informan pribadi, jabatan, dan keterlibatan informan dalam pelaksanaan program pendidikan dan penyediaan akses.

2. Triangulasi

Merupakan salah satu cara untuk mendapatkan data yang valid. Triangulasi dalam penerapannya merupakan penggunaan dua atau lebih sumber untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang hal yang akan diteliti. Prinsip dalam teknik triangulasi, informasi mestilah dikumpulkan atau dicari dari sumber-sumber yang berbeda. Triangulasi dapat dilakukan terus menerus sampai peneliti puas dengan datanya, dan yakin akan kevalidan datanya. Sehingga triangulasi dilakukan untuk memperkuat data serta meyakinkan peneliti terhadap kebenaran dan kelengkapan data-data yang ada.



Gambar 3.1 Triangulasi Pangumpulan Data

H. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara siklus. “Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain” (Sugiyono, 2017:335).

Dalam penelitian ini menggunakan tiga komponen analisis data menurut Miles dan Huberman, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Peneliti memilih hal-hal pokok dan penting bagi penelitian. Peneliti memberikan perhatian khusus kepada hal pokok dan penting sesuai dengan yang dicari dalam penelitian. “Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu.” Sugiyono (2017: 338). Reduksi data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis menajamen, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data mengenai peran program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dalam perluasan akses pendidikan di SMK Negeri 1 Bandar Lampung. Reduksi data dapat dilaksanakan setelah penelitian dilapangan dilakukan sampai laporan akhir lengkap tersusun. Selanjutnya data yang telah di

reduksi dapat mempermudah peneliti serta dijadikan fokus terhadap tahapan selanjutnya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, selanjutnya adalah menyajikan data. Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. “Tahap penyajian data adalah sebuah tahap lanjutan analisis dimana peneliti menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokan” Afrizal (2014: 179).

Dalam penyajian data ini, informasi yang ditemukan dalam data dapat diambil kesimpulan serta penarikan kesimpulan untuk menentukan sebuah tindakan. Prosesnya dilakukan dengan cara memahami dan mengetahui bagaimana peran program BOSDA terutama di SMK Negeri 1 Bandar Lampung dan seberapa besar program BOSDA berperan terhadap perluasan akses pendidikan.

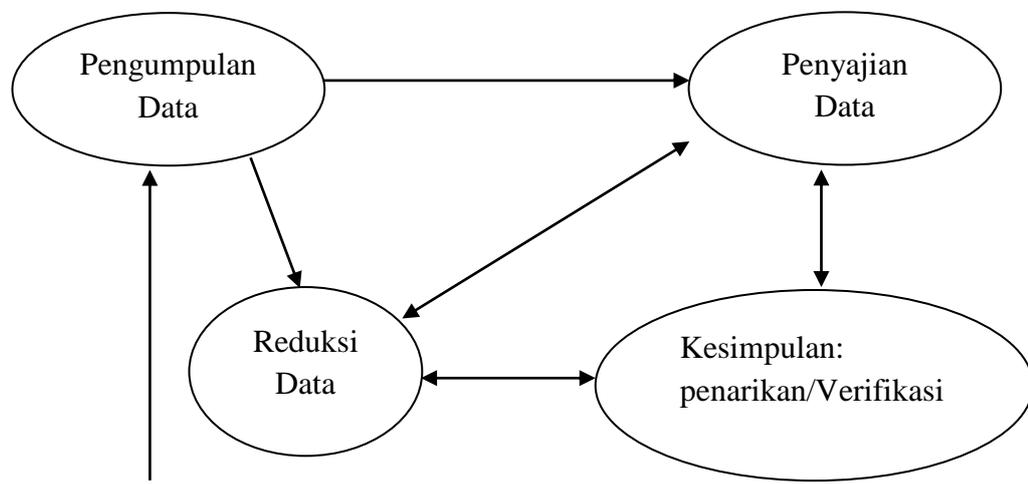
3. Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Penarikan Kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu selama proses pengumpulan data. Setelah ditarik kesimpulan, peneliti melakukan cek ulang terhadap proses reduksi data dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang telah dilakukan dan ditemukan temuan penelitian berdasarkan analisis data yang dilakukan terhadap suatu wawancara

mendalam atau sebuah dokumen. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan observasi dan wawancara.

Menurut Miles dan Huberman, ketiga langkah tersebut dilakukan atau diulangi terus setiap setelah melakukan pengumpulan data. Dengan demikian, ketiga tahap tersebut harus terus dilakukan sampai penelitian berakhir.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.2 Analisis Data menurut Miles dan Huberman.

I. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian pada hakikatnya merupakan persiapan dan susunan rencana sistematis yang dilakukan peneliti agar penelitian mencapai tujuan yang diharapkan. Kegiatan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Persiapan Pengajuan Judul

Sebagai langkah awal yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah mengajukan dua judul yang terdiri atas judul utama dan judul alternatif

kepada dosen pembimbing akademik yaitu bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd. yang sekaligus sebagai ketua program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Universitas Lampung. Setelah judul di setujui oleh pembimbing akademik, dan pada tanggal 1 Oktober 2018 salah satu judul disetujui oleh ketua program studi PPKn, kemudian judul diajukan kepada ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung pada tanggal 15 Oktober 2018.

2. Penelitian Pendahuluan

Setelah mendapatkan surat izin pendahuluan dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Nomor 7118/UN26.13/PN.01.00/2018 pada tanggal 16 Oktober 2018. Peneliti kemudian mengajukan surat izin penelitian ke SMK Negeri 1 Bandar Lampung. Setelah mendapatkan surat balasan pada tanggal 23 Oktober 2018 dari SMK Negeri 1 Bandar Lampung peneliti melakukan penelitian pendahuluan dan data yang diperoleh menjadi gambaran umum untuk menulis proposal penelitian yang akan diteliti. Penelitian ini ditunjang dengan arahan-arahan dari dosen pembimbing. Pada tanggal 5 Desember 2018 disetujui oleh pembimbing I untuk melaksanakan seminar proposal yang kemudia disahkan oleh Ketua Program Studi PPKn. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan masukan-masukan saran dari dosen pembahas dalam penyempurnaan penyusunan skripsi ini.

3. Pengajuan Rencana Penelitian

Rencana penelitian diajukan oleh peneliti untuk mendapatkan persetujuan dilaksanakannya seminar proposal. Setelah melalui proses konsultasi dan perbaikan-perbaikan proposal skripsi dari pembimbing I dan II maka seminar proposal dilakukan pada tanggal 9 Januari 2019. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah perbaikan proposal skripsi dengan komisi pembimbing, komisi pembahas, Ketua Program Studi PPKn, dan koordinator seminar.

4. Penyusunan Kisi dan Instrumen Penelitian

Penyusunan kisi dan instrument penelitian dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam rangka mengumpulkan data dari informan penelitian. Kisi-kisi dan instrumen tersebut akan menjadi pedoman peneliti dalam menggali informasi dan data yang diperlukan.

Berikut langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam penyusunan kisi-kisi dan instrumen penelitian:

- a. Menentukan tema berdasarkan penelitian yaitu peranan program BOSDA dalam upaya memperluas kesempatan bagi peserta didik memperoleh akses pendidikan, kemudian membuat dimensi dan indikator sesuai dengan tema yang telah ditentukan.
- b. Membuat pertanyaan wawancara sesuai dengan dimensi dan indikator-indikator yang telah dibuat sebelumnya, yaitu dimensi peran program BOSDA dengan indikator sasaran program BOSDA, tujuan program BOSDA dan Efektif/Efisien program BOSDA kemudian dimensi

perluasan akses pendidikan dengan indikator *equality* (Persamaan) dan *equity* (Keadilan).

- c. Penyusunan pertanyaan wawancara dengan informan penelitian dan membuat klasifikasi pertanyaan berdasarkan informan.
- d. Setelah kisi-kisi dan instrument wawancara, observasi, dokumentasi diajukan dan disetujui oleh pembimbing I dan II, maka peneliti siap melaksanakan penelitian.

5. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian dilaksanakan setelah melakukan surat izin penelitian dari Dekan FKIP Universitas Lampung No. 1608/UN26.13.05.2/PP.05.02.00/2019 yang kemudian diajukan kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bandar Lampung agar diberikan persetujuan melakukan penelitian di SMK Negeri 1 Bandar Lampung. Tahapan ini lebih mudah dikarenakan sebelumnya sudah dilakukan penelitian pendahuluan dan mendapatkan izin dari kepala sekolah dengan dikeluarkannya surat balasan izin penelitian. Namun surat izin penelitian dari Dekan FKIP Unila tetap diserahkan kepada Kepala SMK Negeri 1 Bandar Lampung.

Penelitian ini dilakukan dengan mendatangi informan-informan yaitu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bandar Lampung, Bendahara BOSDA SMK Negeri Bandar Lampung, Tenaga Pendidik/Guru, dan Peserta didik Penerima program BOSDA. Data dan informasi yang diperoleh dengan teknik wawancara dan observasi dengan informan lalu didokumentasikan. Berikut jadwal wawancara, observasi dan dokumentasi penelitian:

Tabel 3.1 Jadwal Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi Penelitian di SMK Negeri 1 Bandar Lampung.

No	Tanggal Penelitian	Teknik Pengumpulan Data	Informan
1	25/10/2018	Observasi	KS
2	07/11/2018	Wawancara	KS
3	09/11/2018	Observasi, Dokumentasi	BBS
4	12/11/2018	Wawancara	BBS
5	14/11/2018	Wawancara	TP
6	15/11/2018	Wawancara	PD
7	26/02/2019	Observasi	BBS
8	27/02/2019	Dokumentasi	BBS
9	28/02/2019	Pegamatan Kelas XI SMK, dokumentasi	TP,PD
10	01/ 03/2019	Wawancara, Observasi	KS
11	02/03/2019	Pengamatan kegiatan Rohis, dokumentasi	TP,PD
12	04/03/2019	Wawancara, Dokumentasi	KS
13	05/03/2019	Wawancara, Observasi, Dokumentasi	BBS
14	06/03/2019	Wawancara, Observasi, Dokumentasi	TP
15	08/03/2019	Wawancara, Observasi, Dokumentasi	PD1
16	08/03/2019	Wawancara, Observasi, Dokumentasi	PD2
17	16/03/2019	Pengamatan kegiatan Voli, dokumentasi	TP,PD
18	19/03/2019	Pengamatan Kegiatan Kebersihan Perpustakaan, dokumentasi	TP,PD
19	20/03/2019	Pengamatan Kegiatan Lab, dokumentasi	TP,PD
20	21/03/2019	Pengamatan Kegiatan Praktik Shalat, dokumentasi	TP, PD
21	22/03/2019	Dokumentasi penunjang BOSDA	BBS

Sumber: Analisis Jadwal Pelaksanaan Penelitian dan Instrumen Penelitian

Berdasarkan tabel tersebut terdapat beberapa penelitian yang tidak dapat didokumentasikan. Data tersebut dalam bentuk berkas/file, rekaman suara dan catatan-catatan pribadi. Keseluruhan data dan informasi yang diperoleh dari informan-informan dianalisis dan beberapa data dari SMK Negeri 1 Bandar Lampung kemudian dilampirkan.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang sudah disesuaikan dapat disimpulkan bahwa program Bantuan Operasional Sekolah Daerah di SMK Negeri 1 Bandar Lampung telah dilaksanakan dengan baik dan penuh dukungan baik dari sekolah maupun peserta didik sebagai seseorang yang merasakan program tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa program BOSDA memang berperan dalam perluasan akses pendidikan, seperti memberikan kesempatan bagi peserta didik tidak mampu memperoleh akses pendidikan melalui pendidikan formal dengan meniadakan biaya pendidikan bagi peserta didik seperti SPP, memberikan bantuan operasional pembelajaran seperti tersedianya alat dan bahan untuk praktik, dan membebaskan pungutan biaya ekstrakurikuler dan program bimbingan/les di sekolah bagi peserta didik tidak mampu.

Peran program BOSDA dilihat dari sasaran program di SMK Negeri 1 Bandar Lampung memfokuskan kepada bantuan operasional pembelajaran khususnya pada peserta didik tidak mampu dengan pengawasan ketat dari tim verifikasi Pemerintah Daerah dan tim survey dari sekolah yang memastikan bahwa sasaran program BOSDA telah tepat diberikan dengan tujuan untuk

meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan baik negeri maupun swasta agar dapat menekan angka putus sekolah khususnya di SMK.

Disisi lain, program BOSDA SMK Negeri 1 Bandar Lampung ternyata telah berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan aturan dan juknis yang telah ditetapkan, walaupun setiap program tentu mengalami kendala-kendala kecil seperti di SMK Negeri 1 Bandar Lampung kendala tersebut seperti keterlambatan pencairan dana yang kemudian berimbas kepada terhambatnya keperluan sekolah, tetapi pihak sekolah harus berupaya untuk mengatasinya dengan pemberian sosialisasi kepada seluruh masyarakat di lingkungan SMK Negeri 1 Bandar Lampung.

SMK Negeri 1 Bandar Lampung memberikan sebesar 60 persen penerimaan bagi peserta didik tidak mampu, hal ini menimbulkan sisi positif dan negatif. Sisi positifnya ialah terlihat bahwa SMK Negeri 1 Bandar Lampung telah berupaya mendukung perluasan akses pendidikan dengan mengajukan permohonan program BOSDA yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, sedangkan sisi negatifnya yaitu hal ini seringkali dijadikan kecurangan bagi masyarakat mampu yang ingin mendapatkan program BOSDA juga.

Program BOSDA di SMK Negeri 1 Bandar Lampung mengedepankan upaya memperluas pemberian kesempatan yang setara bagi peserta didik yang tidak mampu untuk mendapatkan akses layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu serta menekan angka putus sekolah terhadap SMK tetapi tidak menuntut adanya diskriminasi atau perbedaan perlakuan baik kegiatan ekstrakurikuler, prakerin, maupun kegiatan belajar mengajar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dikemukakan diatas, dapat disampaikan saran-saran yang perlu menjadi bahan masukan dalam menjalankan program Bantuan Operasional Sekolah Daerah dalam perluasan akses pendidikan di SMK Negeri 1 Bandar Lampung pada umumnya sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan diharapkan lebih memperhatikan pendanaan dalam program Bantuan Operasional Sekolah Daerah dengan menambah besaran alokasi dana per individu sehingga kebutuhan peserta didik di sekolah dapat tercukupi.

2. Bagi Sekolah

Sekolah diharapkan dapat memanfaatkan program BOSDA sesuai dengan juknis yang ada sehingga dapat mengatasi kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan program BOSDA di Sekolah.

3. Bagi Peserta Didik

Peserta didik penerima BOSDA diharapkan belajar lebih giat dan aktif dalam kegiatan yang dilakukan sekolah agar dapat menjadi lulusan yang kompeten dan siap bekerja sesuai dengan tujuan SMK.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif (Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmadi, Abu., & Uhbiyanti, Nur. 2015. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andiyana, Meishya Puspita., Yanzi, Hermi., & Nurmalisa, Yunisca. 2016. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 Tentang PKL Di Kecamatan Kemiling. *Jurnal Kultur Demokrasi*. Volume 4. Nomor 1.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2018*. Nomor 57/07/Th. XXI.
- Badruzzaman. 2013. Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan Di Kabupaten Sorong. *Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya*. Volume 19.
- Bakry, Aminuddin. 2010. Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik. *Jurnal MEDTEK*. Volume 2. Nomor 1.
- Barnoto. 2016. Implementasi Kebijakan Program Akselerasi Di Madrasah Aliyah Unggulan Amanatul Ummah Pacet Mojokerto. *JOIES: Jurnal Of Islamic Education Studies*. Volume 1. Nomor 2.
- Basrowi & Juariyah, Siti. 2010. Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*. Volume 7. Nomor 1.
- Disas, Eka Prihatin. 2017. Analisis Kebijakan Pendidikan Mengenai Perkembangan Dan Peningkatan Profesi Guru. *Jurnal Penelitian Pendidikan*. Volume 17. Nomor 2.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Haluan. 2016. *Alih Kewenangan SMA/SMK dan Kualitas Pendidikan*. Diakses dari: www.haluan.com/amp/detail/50078/alih-kewenangan-smasmk-dan-kualitas-pendidikan. Pada 22 Oktober 2018.
- Harian Pilar. 2015. *Program Bina Lingkungan (Biling) Langgar Perda*. Diakses dari: [www.harianpilar.com/program-bina-lingkungan-\(biling\)-langgar-perda.html](http://www.harianpilar.com/program-bina-lingkungan-(biling)-langgar-perda.html). Pada 18 Oktober 2018.
- Hasbullah. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Herdiyansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Idris, Ridwam. 2010. APBN Pendidikan Dan Mahalnya Biaya Pendidikan. *Jurnal Lentera Pendidikan*. Volume 13. Nomor 1.
- Ihsan, Fuad. 2008. *Dasar-Dasar Kependidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Irianto, Yoyon Bahtiar. 2012. *Kebijakan Pembaruan Pendidikan (Konsep, Teori, dan Model)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Islamy, Irfan Muh. 2014. Definisi dan Makna Kebijakan Publik. *Modul Kebijakan Publik*. Volume 1. Nomor 1.
- Kadir Abdul, Fauzi Ahmad, dkk. 2012. *Dasar-Dasar Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Kintamani, Ida. 2008. Kesenjangan Gender Dalam Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*. Volume 14. Nomor 75.
- Kompas. 2017. *Kenaikan Gaji Lebih Kecil Dari Kenaikan Biaya Pendidikan*. Diakses dari: www.ekonomi.kompas.com/read/2017/07/17/084700526/kenaikan-gaji-lebih-kecil-dari-biaya-pendidikan-solusinya/. Pada 17 Januari 2019.
- Kupas Tuntas. 2017. *Program Biling Beralih Ke Dana Bosda Pemprov Lampung*. Diakses dari: www.kupastuntas.co/2017/03/program-biling-beralih-ke-bosda-pemprov-lampung-sediakan-rp75-miliar-dana-bosda-untuk-siswa-kurang-mampu/. Pada 22 Oktober 2018.
- Lubis, Asri. 2013. Pelaksanaan Standar Nasional Dalam Dunia Pendidikan. *Jurnal Theory and Practice Of Education*. Volume 1. Nomor 1.

- Meilina, Duwi., Suntoro, Irawan., & Sowiyah. Implementasi Kebijakan Pendidikan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah SMA Negeri 1 Kasui. *Jurnal Thesis Manajemen Mutu Pendidikan*. Volume 4. Nomor 2. Nomor 1.
- Meltiana, Noor Muhammad & Amin, HM Djamal. 2017. Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi Kasus Di SMA Negeri 2 Sendawar Kabupaten Kutai Barat). *Jurnal Thesis Ilmu Administrasi Negara*. Volume 5. Nomor 1.
- Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Prijono, Onny S, dkk. 1980. *Situasi Pendidikan Di Indonesia (Selama Sepuluh Tahun Terakhir Bagian II-A)*. Jakarta: Centre For Strategic And International Studies (CSIS).
- Provinsi Lampung. 2014. *Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2014. Tentang Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun*.
- Provinsi Lampung. 2017. *Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2017, Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017*.
- Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang RI Nomor 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Republik Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tentang Pendidikan Dan Kebudayaan*.
- Roza, Prima. 2007. Pendidikan Dan Mutu Pendidikan. *Jurnal Sositologi*. Volume 12. Nomor 6.
- Su'ada. 2015. Implementasi Program Bina Lingkungan Dalam Rangka Meningkatkan Akses Pendidikan Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Bandar Lampung Tahun 2014 (Studi Pada Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peserta Didik Baru). *Jurnal Thesis Ilmu Administrasi*.
- Subarsono, AG. 2013. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI).

- Supardi. 2011. *Dasar-Dasar Ilmu Sosial*. Jakarta: Penerbit Ombak.
- Suryanti, Yesi., Pitoewas, Berchah., dan Yanzi, Hermi. 2017. Pengaruh Kebijakan Tentang Penghentian Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Terhadap Sikap Masyarakat. *Jurnal Kultur Demokrasi*. Volume 5. Nomor 3.
- Suwitri, Sri. 2008. Konsep Dasar Kebijakan Publik. *Modul Kebijakan Publik*.
- Syarbaini, Syahrial & Rusdiyanta. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tami Mu'amalia., Holilulloh., dan Nurmalisa, Yunisca. 2016. Peran Panti Sosial Dalam Membina Dan Meningkatkan *Life Skills* Anak Terlantar. *Jurnal Kultur Demokrasi*. Volume 4. Nomor 4.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Website SMK. *Persyaratan Penerima Bosda*. Diakses dari: smkn1bdl.sch.id. Pada 6 November 2018.